



Riau Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah Menjaga Marwah



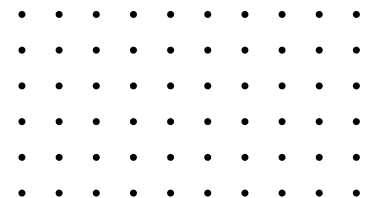
# RENSTRA

## 2025 - 2029



### BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

JL. OTTO ISKANDARDINATA  
NO. 107 JAKARTA TIMUR  
13330 Tlp.(021) 8194174  
[www.badanpenghubung.riau.go.id](http://www.badanpenghubung.riau.go.id)





**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**YAN DHARMADI, SH, MH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Dasar Hukum.....	3
1.3    Maksud dan Tujuan.....	6
1.4    Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU</b>	
<b>STRATEGIS.....</b>	<b>9</b>
2.1    Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Provinsi	
Riau.....	10
2.2    Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Riau.....	12
2.2.1    Sumber Daya Manusia.....	12
2.2.2    Sarana dan Prasarana.....	16
2.3    Kinerja Pelayanan.....	20
2.4    Kelompok Sasaran Pelayanan.....	36
2.5    Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	36
2.6    Identifikasi Permasalahan.....	37
2.7    Isu Strategis.....	42
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>45</b>
3.1    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	45
3.2    Strategi Perangkat Daerah.....	47
3.3    Pentahapan.....	48
3.4    Lokus.....	49
3.5    Kebijakan.....	50
<b>BAB IV</b> <b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>61</b>
4.1    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	61
4.2    Subkegiatan Beserta Kinerja, Indicator, Target Dan	
Pagu Indikatif.....	71

4.3	Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	82
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	82
4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	83
BAB V	PENUTUP .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Badan Penghubung Provinsi Riau menurut Jenis Kelamin.....	13
Tabel 2.2	Jumlah ASN Badan Penghubung Prov. Riau Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.3	Jumlah ASN Badan Penghubung Provinsi Riau Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.4	Jumlah ASN Badan Penghubung Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2.5	Daftar Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Riau.....	17
Tabel 2.6	Daftar Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan...	18
Tabel 2.7	Daftar Barang Jumlah Kamar Penginapan.....	18
Tabel 2.8	Kendaraan Dinas pada Badan Penghubung Provinsi Riau..	19
Tabel 2.9	Capaian Kinerja berdasarkan Target Renstra Tahun 2020 - 2021 .....	20
Tabel 2.10	Capaian Kinerja berdasarkan Target Renstra Tahun 2022 - 2024 .....	21
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD).....	22
Tabel 2.12	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2019 - 2024.....	23
Tabel 2.13	Daftar Jumlah Standar Pelayanan.....	23
Tabel 2.14	Daftar Diklat/Seminar/Bimtek/Sertifikasi.....	24
Tabel 2.15	Daftar Belanja Modal.....	25
Tabel 2.16	Daftar Biaya Pemeliharaan.....	26
Tabel 2.17	Target dan Pencapaian Penerimaan.....	28
Tabel 2.18	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau.....	30
Tabel 2.19	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung.....	31
Tabel 2.20	Tabel Mitra Perangkat Daerah.....	36
Tabel 2.21	Pokok Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau.....	41

Tabel 2.22	Analisa Isu Strategis.....	44
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	46
Tabel 3.2	Tahapan Pencapaian Strategis.....	48
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.....	49
Tabel 3.4	Lokus Pelayanan Strategis Badan Penghubung Provinsi Riau.....	49
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan Renstra PD Tahun 2025 - 2029.....	54
Tabel 3.6	Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD.....	56
Tabel 4.1	Pentahapan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah..	62
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	70
Tabel 4.3	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	72
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Riau.....	82
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Riau..	82
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Riau..	12
Gambar 2.2	Komposisi Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Riau.....	13
Gambar 2.3	Komposisi ASN Badan Penghubung Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan.....	14
Gambar 2.4	Komposisi ASN Badan Penghubung Provinsi Riau Berdasarkan Golongan.....	15
Gambar 2.5	Komposisi ASN Badan Penghubung Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan.....	16
Gambar 2.6	Grafik Belanja Modal.....	26
Gambar 2.7	Grafik Target dan Pencapaian Penerimaan.....	29
Gambar 3.1	Cascading Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Riau.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

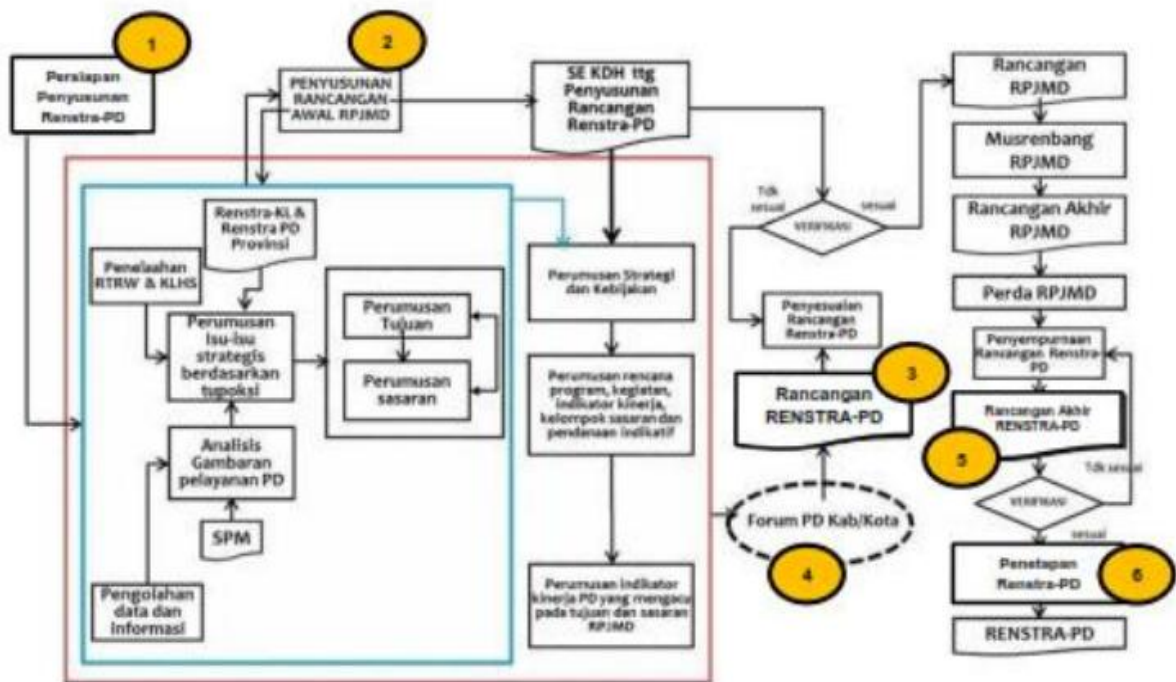
Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pembangunan daerah yaitu perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengingat telah berakhirnya masa periode RPJMD Tahun 2019-2024, Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat

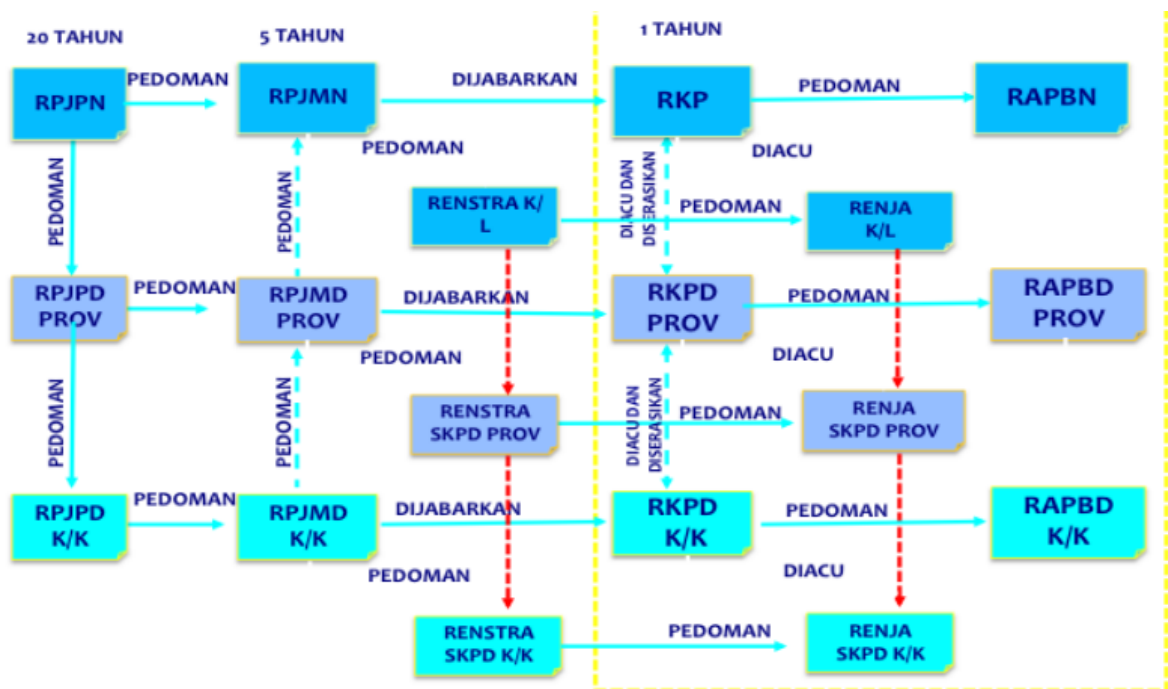
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan bidang urusan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Riau berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 yang diawali dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



**Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan renstra perangkat daerah, berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra K/L terkait dan Renstra kabupaten/ kota terkait dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut :



**Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya**

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nmr 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Provinsi Riau Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3 )
  17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
  20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau, (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 82);
  21. Peraturan Gubenur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
  22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029; (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau dan mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender.

#### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025-2029;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang responsive gender dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029;
4. Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif

### **1.4 Sistematika**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengacu kepada Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan
- 2.6 Identifikasi Permasalahan
- 2.7 Isu Strategis

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah
- 3.3 Pentahapan
- 3.4 Lokus
- 3.5 Kebijakan

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program
- 4.2 Kegiatan
- 4.3 Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

Badan Penghubung Provinsi Riau merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan Kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Riau mencakup urusan sebagai berikut :

- Kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengelolaan keuangan serta pengawasan.
- Fasilitasi urusan pemerintahan
- Fasilitasi urusan masyarakat
- Fasilitasi pelayanan pejabat daerah
- Fasilitasi informasi/ kehumasan
- Fasilitasi promosi seni budaya, pariwisata, produk unggulan dan potensi daerah

Fungsi ini belum mencapai hasil yang diharapkan, hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Riau adalah :

- Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)  
Lemahnya kemampuan dan profesionalitas aparatur pemerintah dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi yang diawali dengan assessment pejabat struktural yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini berdampak negatif terhadap pengelolaan manajemen suatu organisasi perangkat daerah.

Beragamnya latar belakang dan pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya, merupakan kendala tersendiri dalam menjalankan tugas. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman SDM terhadap jenis, standar dan mutu layanan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penghubung.

- Struktur dan Tata Kelola  
Penataan struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi Badan Penghubung Provinsi Riau belum optimal, masih diperlukan penyesuaian dalam rangka memposisikan peran dan fungsi Badan Penghubung sebagai fasilitator dan koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
- Koordinasi Internal dan Eksternal  
Belum adanya kesamaan pemahaman antar satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota terhadap tugas dan fungsi Badan Penghubung merupakan hambatan untuk terwujudnya koordinasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Penghubung Provinsi Riau**

Badan Penghubung Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Badan Penghubung Provinsi Riau menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau adalah sebagai berikut :**

1. Kepala Badan  
Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

kepegawaian, pengelolaan keuangan, umum serta pengawasan.

3. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas fasilitasi urusan pemerintahan pada Pemerintah pusat dan urusan masyarakat yang ada di Ibukota dan sekitarnya.

4. Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol

Kepala Subbidang Humas dan Protokol mempunyai tugas fasilitasi pelayanan pejabat daerah dan pelayanan informasi/kehumasan.

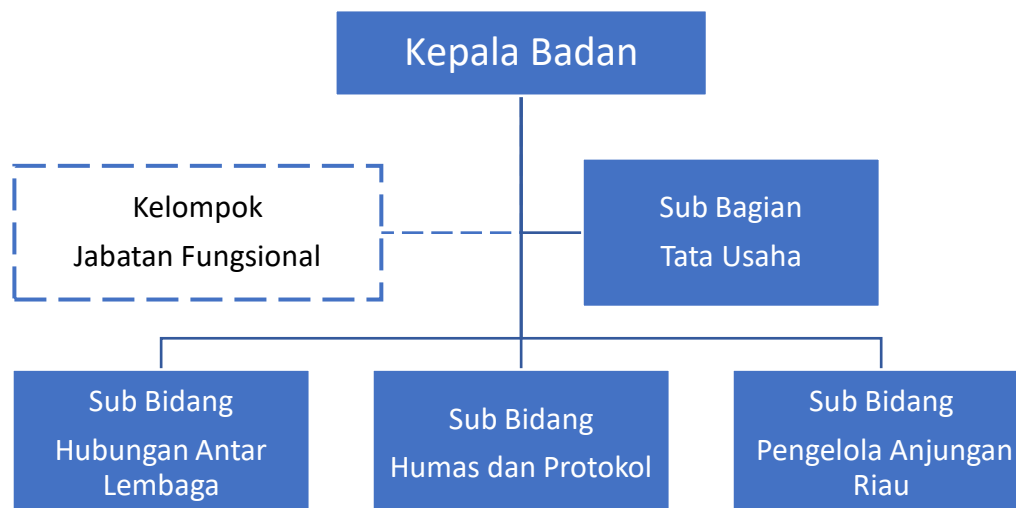
5. Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau

Kepala Subbidang Pengelola Anjungan Riau mempunyai tugas fasilitasi promosi seni budaya, pariwisata, produk unggulan dan potensi daerah.

### **Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Riau**

Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Penghubung merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) yang membawahi 4 (empat) Pejabat Pengawas (eselon IV.a). Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Humas dan Protokol
5. Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau
6. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Riau**

Sebagai sebuah badan yang mempunyai peran mewakili Pemerintah Daerah di pusat, jabatan Kepala Badan Penghubung yang dipegang oleh seorang pejabat Administrator dipandang belum sesuai dengan tanggungjawabnya yang setara pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Hal ini menjadi pertimbangan untuk meningkatkan level organisasi Badan Penghubung agar bisa menjalankan perannya secara maksimal.

## **2.2 Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Riau**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Riau didukung sumber daya sebagai berikut :

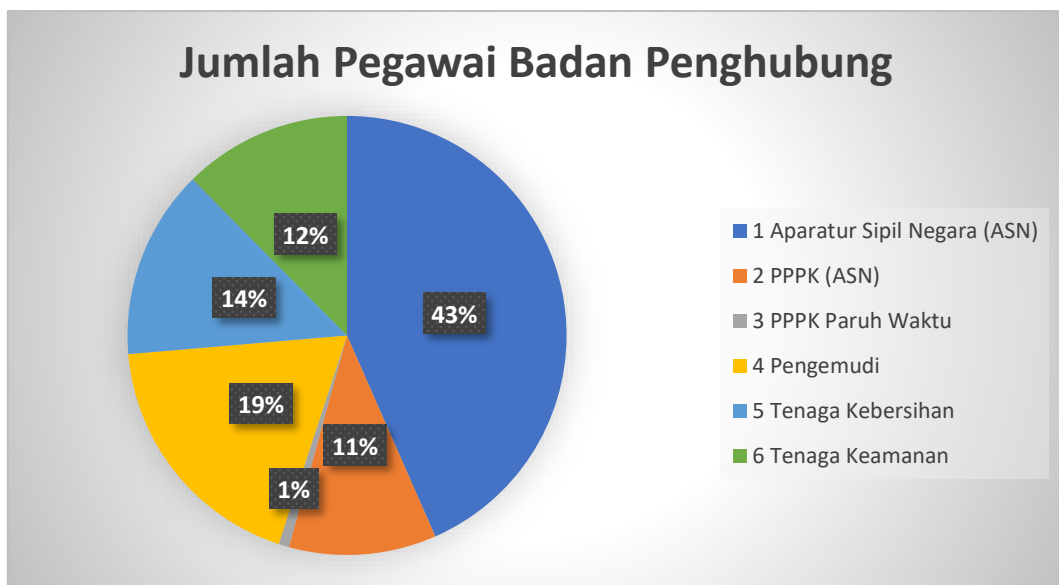
### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Badan Penghubung Provinsi Riau didukung pegawai sejumlah 128 orang yang terdiri dari 79 pria dan 49 wanita, pengemudi dan tenaga keamanan seluruhnya adalah pria. Jumlah pegawai terbesar adalah ASN sebanyak 69 Orang, pengemudi 24 orang dan terkecil adalah Tenaga Keamanan 16 orang. 1 orang ASN penyandang disabilitas yang bertugas sebagai PPPK.

**Tabel 2.1 Jumlah ASN Badan Penghubung Prov. Riau menurut Jenis Kelamin**

No	Pegawai	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Jumlah (Orang)	%
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	22	34	56	43,41%
2	PPPK (ASN)	8	6	14	10,85%
3	PPPK Paruh Waktu	1		1	0,78%
4	Pengemudi	24	0	24	18,60%
5	Tenaga Kebersihan	10	8	18	13,95%
6	Tenaga Keamanan	16	0	16	12,40%
	<b>Jumlah</b>	81	48	129	100,00%

*Sumber : Data Kepegawaian Badan Penghubung*



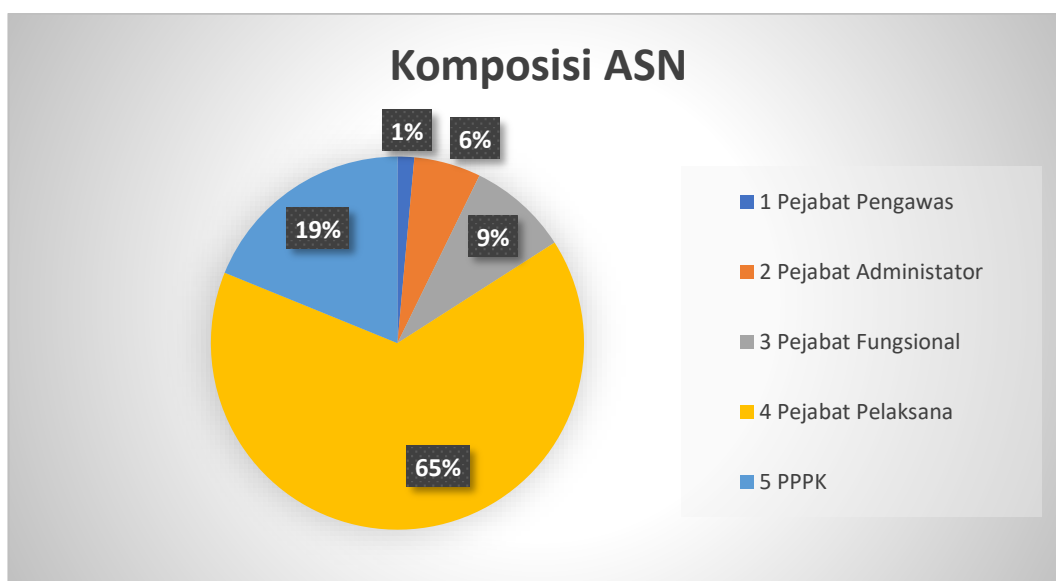
**Gambar 2.2 Komposisi Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Riau**

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa jumlah ASN yaitu 69 orang atau 53,90%, lebih banyak dibanding dengan jumlah non ASN yaitu 53 orang atau 46,10%. Ini memperlihatkan bahwa aktifitas urusan wajib yang dilaksanakan oleh ASN masih seimbang dengan aktifitas pendukung operasional yang dilaksanakan oleh non ASN. Jumlah 128 orang pegawai ini merupakan potensi yang besar untuk melaksanakan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau.

**Tabel 2.2. Jumlah ASN Badan Penghubung Prov. Riau berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Pria (Org)	Wanita (Org)	Jumlah (Org)	%
1	Pejabat Pengawas	1	0	1	1,45%
2	Pejabat Administator	3	1	4	5,80%
3	Pejabat Fungsional	3	3	6	8,70%
4	Pejabat Pelaksana	15	30	45	65,22%
5	PPPK	6	7	13	18,84%
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>69</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Badan Penghubung*



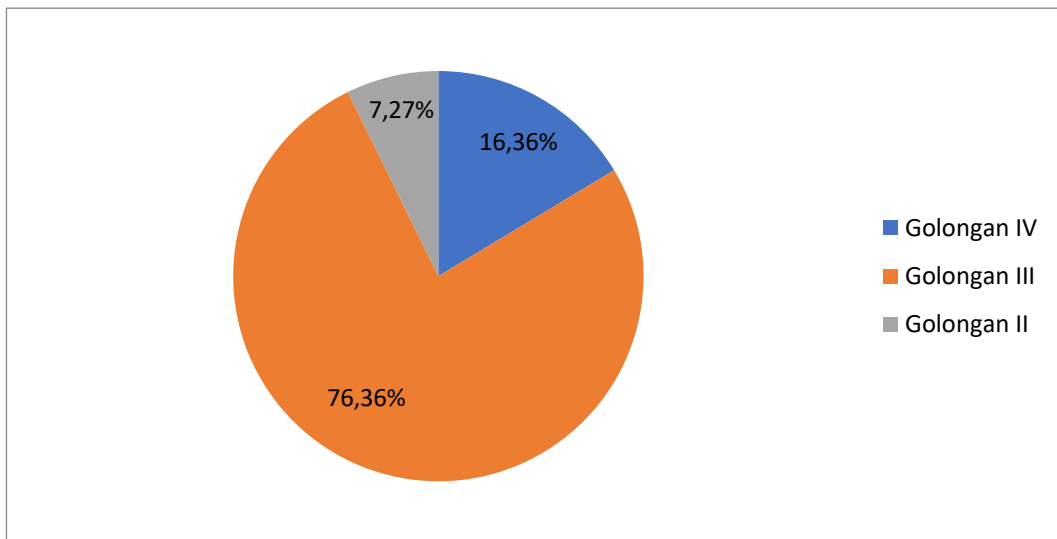
**Gambar 2.3 Komposisi ASN Badan Penghubung Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan**

Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa jumlah ASN wanita lebih besar dibanding pria, sehingga pengarusutamaan gender perlu menjadi perhatian yang besar bagi Badan Penghubung Provinsi Riau.

**Tabel 2.3 Jumlah ASN Badan Penghubung Prov. Riau berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Golongan IV	3	7	10	16,36%
2	Golongan III	17	25	42	76,36%
3	Golongan II	2	2	4	7,27%
	<b>Jumlah</b>	22	34	56	100,00%

Sumber : Data Kepegawaian Badan Penghubung



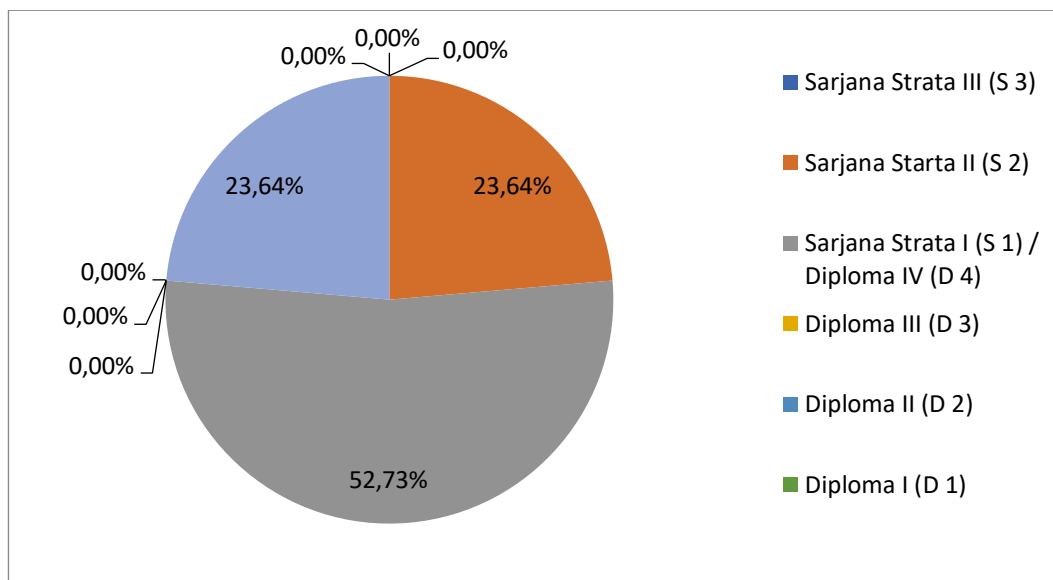
**Gambar 2.4 Komposisi ASN Badan Penghubung Provinsi Riau berdasarkan Golongan**

**Tabel 2.4 Jumlah ASN Badan Penghubung Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sarjana Strata III (S 3)	-	-	0	0,00%
2	Sarjana Starta II (S 2)	3	10	13	24,56%
3	Sarjana Strata I (S 1) / Diploma IV (D 4)	13	16	29	52,73%
4	Diploma III (D 3)	-	-	0	0,00%
5	Diploma II (D 2)	-	-	0	0,00%
6	Diploma I (D 1)	-	-	0	0,00%

No	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	SMA / SLTA sederajat	6	7	13	23,64%
8	SMP / SLTP sederajat	-	-	0	0,00%
9	SD sederajat	-	-	0	0,00%
	Jumlah	22	34	56	100,00%

Sumber : Data Kepegawaian Badan Penghubung



**Gambar 2.5 Komposisi ASN Badan Penghubung Provinsi Riau berdasarkan Pendidikan**

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa sebanyak 92,72% ASN Badan Penghubung Provinsi Riau berada pada golongan III dan IV. Hal ini sejalan dengan tabel 2.4 yang menunjukkan bahwa ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana sebanyak 77,29%. Ini berarti Badan Penghubung Provinsi Riau mempunyai potensi kualifikasi ASN yang sangat baik dan menjadi modal penting bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai sumber daya lainnya yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Riau dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana tertera dalam table berikut :

**Tabel 2.5 Daftar Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung  
Provinsi Riau**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	Tanah	7	7.568.600.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2053	26.072.800.977,10
	▪ Alat angkutan	37	16.547.481.420,45
	- Kendaraan roda 4	36	16.535.346.421,45
	- Kendaraan roda 2	1	12.134.999,00
	▪ Alat kantor dan rumah tangga	1.698	6.185.678.962,61
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	100	1.516.241.978,97
	- Komputer	212	1.822.678.315,07
3	Gedung dan Bangunan	19	24.026.115.778,41
	▪ Bangunan Gedung	12	16.523.729.928,35
	▪ Monumen	6	7.497.464.461,26
	- Menara	1	4.921.388,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	810	3.169.055.349,81
	- Bahan Perpustakaan	210	253.836.525,22
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	600	2.915.218.824,59
6	Konstruksi dalam pengerjaan	1	49.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.890</b>	<b>60.886.072.105,32</b>

*Sumber : Data BMD Badan Penghubung Provinsi Riau*

Aset yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Riau sejumlah 2.890 unit dengan nilai lebih dari Rp 60 milyar, dari jumlah tersebut terdapat aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi yaitu :

**Tabel 2.6 Daftar Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan**

No	Nama Bangunan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah Kamar	Ket
1	Kantor Badan Penghubung	Jakarta Timur	740		
2	Rumah Dinas	Jakarta Timur	314		
3	Anjungan Riau	Jakarta Timur	-		Tanah milik Setneg RI, Terdapat 5 bangunan rumah adat yang salah satunya berfungsi sebagai ruang pertemuan
4	Asrama Mahasiswa Riau	Jakarta Selatan	3.757	30	Gedung putra dan putri dalam 1 area
5	Asrama Mahasiswa Riau	Kab. Bogor, Jawa Barat	3.000	26	Gedung putra dan putri dalam 1 area
6	Asrama Mahasiswa Riau	Megangsan, Yogyakarta	1.147	30	Gedung putra
7	Asrama Mahasiswa Riau	Tegalrejo, Yogyakarta	853	23	Gedung putri
8	Asrama Mahasiswa Riau	Malang, Jawa Timur	463	11	Gedung putra
<b>Jumlah</b>			<b>10.274</b>	<b>120</b>	

Sumber : Data BMD Badan Penghubung Provinsi Riau

**Tabel 2.7 Daftar Barang Jumlah Kamar Penginapan**

No	Penginapan	Jumlah Kamar		
		Putra	Putri	Total
1	Asrama Mahasiswa Jakarta	14	16	30
2	Asrama Mahasiswa Bogor	16	10	26
3	Asrama Mahasiswa Malang	11	-	11
4	Asrama Mahasiswa Yogya Putra	30	-	30
5	Asrama Mahasiswa Yogya Putri	-	23	23
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>49</b>	<b>120</b>

*Sumber : Data BMD Badan Penghubung Provinsi Riau*

Jumlah 10.274 m<sup>2</sup> tanah (kecuali tanah kantor dan rumah dinas) pada Badan Penghubung Provinsi Riau mempengaruhi besaran biaya yang dibutuhkan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Sementara jumlah 120 kamar yang tersedia pada asrama mahasiswa merupakan potensi penerimaan retribusi bagi Badan Penghubung Provinsi Riau yang besarnya diatur oleh Peraturan Daerah.

Bangunan yang dikelola Badan Penghubung Provinsi Riau rata-rata berada dalam kondisi baik karena setiap tahunnya dianggarkan biaya untuk pemeliharaan rutin.

Badan Penghubung Provinsi Riau mengelola sejumlah 41 kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung pelayanan terutama kepada pejabat daerah. Jumlah kendaraan dinas tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8 Kendaraan Dinas pada Badan Penghubung Provinsi Riau**

No	Kendaraan Dinas	Jumlah
1	Kendaraan operasional pejabat	9
2	Kendaraan operasional kantor	32
	Jumlah	41

*Sumber : Data BMD Badan Penghubung Provinsi Riau*

Dari 41 kendaraan yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Riau, terdapat 9 unit kendaraan yang digunakan bagi operasional jabatan yaitu bagi Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Sedangkan 32 kendaraan lainnya adalah merupakan operasional kantor.

Pada umumnya sarana dan prasarana di Badan Penghubung telah merespon terhadap kebutuhan gender (responsif gender) namun secara kualitas belum secara optimal memenuhi standar. Fasilitas di gedung asrama putra dan putri sudah terpisah, toilet di kantor Badan Penghubung belum semuanya terpisah berdasarkan jenis kelamin serta fasilitas

anjungan TMII yang belum optimal merespon terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Pelayanan/ fasilitasi yang diberikan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Protokoler Gubernur Riau dan Wakil Gubernur
2. Fasilitasi akomodasi dan transportasi bagi pejabat/ unsur pemerintah yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta
3. Fasilitasi antar Lembaga pemerintah dan non pemerintah
4. Fasilitasi masyarakat Riau di Jakarta
5. Fasilitasi promosi dan informasi.

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2020 - 2024 diusahakan melalui aktifitas yang berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penghubung Provinsi Riau pada Renstra Perubahan 2019 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.9 Capaian Kinerja berdasarkan Target Renstra Tahun 2020 – 2021**

No	Sasaran	Indikator	Target		Capaian		Rasio (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks Kepuasan Stakeholder	100	100	80,4	80,84	80,4	80,84
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap pelayanan publik di Anjungan Riau TMII	Indeks Kepuasan Pengunjung Anjungan Riau	100	100	78,2	84,06	78,2	84,06

Sumber Data : Data Laproan Capaian IKU Badan Penghubung

**Tabel 2.10 Capaian Kinerja berdasarkan  
Target Renstra Tahun 2022 – 2024**

No	Sasaran	Indikator	Target			Capaian			Rasio (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks Kepuasan Stakeholder	85	86	87	85,66	84,62	85,43	100,7	98,40	98.19

Sumber Data : Data Laproan Capaian IKU Badan Penghubung

**Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD)**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder	100%	100%	85	86	87	80,40%	80,84%	85,66	84,62	85,43	91,72%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap pelayanan publik di Anjungan Riau TMII	100%	100%	NA	NA	NA	78,20%	84,06%	NA	NA	NA	81,13%

Sumber Data : Data Laproan Capaian IKU Badan Penghubung

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja 80% dengan kategori capaian **Tinggi** dan indeks kepuasan masyarakat di atas 80% dengan kategori **Puas**.

**Tabel 2.12 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2019 - 2024**

Visi	: Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia		
Misi	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan kualitas pelayanan Badan Penghubung	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung dalam memfasilitasi urusan stakeholder dan pelayanan publik di Anjungan Riau TMII	Menyusun standar pelayanan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
			Meningkatkan sarana prasarana
			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Sumber Data : Dokumen Renstra 2019 -2025 Badan Penghubung

Selama periode 2020 – 2024, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penghubung sebagai berikut :

1. Menyusun standar pelayanan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Standar pelayanan yang telah disusun adalah :

**Tabel 2.13 Daftar Jumlah Standar Pelayanan**

No	Tahun	Jumlah Standar Pelayanan yang Telah Disusun	Ket
1	2020	-	
2	2021	-	
3	2022	2	- Pemeliharaan kendaraan - Peminjaman kendaraan
4	2023	-	
5	2024	-	

Sumber Data : Perencanaan Badan Penghubung

Pada periode 2020 – 2024, Badan Penghubung Provinsi Riau baru menyusun 2 standar, sementara untuk urusan lain masih menggunakan standar yang disusun tahun 2017.

2. Meningkatkan kualitas SDM

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM, PNS Badan Penghubung Provinsi Riau telah mengikuti diklat/seminar/bimtek/sertifikasi yaitu :

**Tabel 2.14 Daftar Diklat/Seminar/Bimtek/Sertifikasi**

No	Jenis Diklat	Tahun	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Pendidikan formal	2020	-	
		2021	-	
		2022	-	
		2023	-	
		2024	-	
2	Diklat kepemimpinan	2020	-	
		2021	1	Diklat PIM IV
		2022	-	
		2023	-	
		2024	-	
3	Diklat Fungsional	2020	2	Ukom Perencana
		2021	6	Diklat teknis Penerjemah
		2022	1	Bimtek Fungsional Analisis Kebijakan
		2023	2	Bimtek Fungsional Perencana
		2024	-	
4	Diklat Pengadaan Barang/Jasa	2020	-	
		2021	3	Sertifikasi
		2022	-	
		2023	-	
		2024	-	

No	Jenis Diklat	Tahun	Jumlah Peserta	Keterangan
5	Keuangan, Kepegawaian, BMD, dan lainnya	2020	-	
		2021	9	- Tunas integritas, - Karsipan, Kepegawaian dan BMD
		2022	4	- Perbendaharaan - Protokol
		2023	-	
		2024	-	
<b>Jumlah</b>			<b>28</b>	

Sumber Data : Data Kepegawaian Badan Penghubung

Dari 58 orang PNS Badan Penghubung Provinsi Riau, jumlah keikutsertaan sebesar 28 kali dalam rentang waktu 4 tahun merupakan jumlah yang sangat minim.

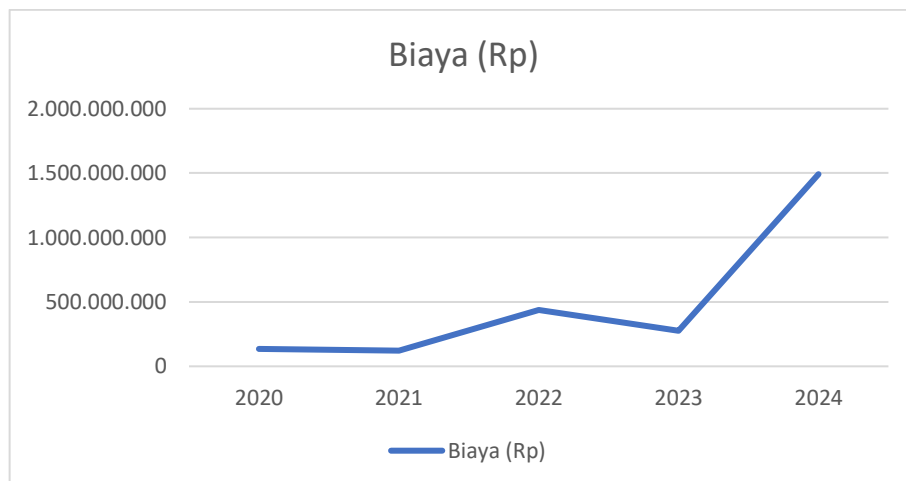
3. Meningkatkan sarana prasarana

Badan Penghubung telah melakukan pengadaan belanja modal yaitu :

**Tabel 2.15 Daftar Belanja Modal**

No	Tahun	Vol. Peralatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2020	9	133.157.685	-
2	2021	24	121.647.747	-
3	2022	31	437.628.499	-
4	2023	25	273.928.533	-
5	2024	250	1.491.669.390	
<b>Jumlah</b>		<b>339</b>	<b>2.458.031.854</b>	

Sumber Data : Perencanaan Badan Penghubung



**Gambar 2.6 Grafik Belanja Modal**

Dalam rentang waktu 2020-2024, tercatat pengadaan modal pada Badan Penghubung Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 2.458.031.854. Peningkatan pengadaan belanja modal pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengadaan fasilitas untuk asrama mahasiswa Riau di pulau Jawa, khususnya pada asrama putra dan putri Riau DI Yogyakarta.

Peningkatan sarana dan prasarana selain dilaksanakan dengan pengadaan baru, juga dilaksanakan dengan pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang sudah ada. Besaran anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana prasarana dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.16 Daftar Biaya Pemeliharaan**

No	Tahun	Biaya Pemeliharaan (Rp)		
		Gedung	Kendaraan	Peralatan
1	2020	292.500.000	1.611.050.000	141.000.000
2	2021	3.409.082.995	1.201.779.280	65.240.000
3	2022	3.363.249.750	1.484.419.200	127.270.000
4	2023	3.039.962.699	1.896.765.500	93.470.000
5	2024	3.453.162.409	1.070.510.000	143.064.000
<b>Jumlah</b>		<b>13.557.957.853</b>	<b>7.264.523.980</b>	<b>570.044.000</b>

Sumber Data : Perencanaan Badan Penghubung

Semua gedung yang berada pada pengelolaan Badan Penghubung mendapatkan pemeliharaan rutin setiap tahun, dan ada beberapa bangunan yang mendapatkan pemeliharaan sedang. Pada tahun 2022, bangunan asrama mahasiswa di Yogyakarta baik putra maupun putri telah direnovasi sedang. Tahun 2023 ini bangunan asrama mahasiswa di Bogor yang direnovasi sedang, dan untuk tahun 2024 telah dianggarkan biaya untuk renovasi sedang bagi asrama mahasiswa di Jakarta. Pada tahun 2023 telah dilakukan renovasi terhadap ruang rapat kantor menjadi lebih sesuai untuk digunakan bagi kegiatan rapat pimpinan daerah saat sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Selanjutnya dibuat ruangan promosi yang digunakan oleh organisasi masyarakat Riau di Jakarta.

Kendaraan dinas pada Badan Penghubung mendapatkan service rutin, penggantian suku cadang dan perpanjangan pajak STNK setiap tahunnya. Tahun 2023 ini telah dilakukan penilaian terhadap 8 unit kendaraan yang kondisinya kurang baik yang selanjutnya direncanakan untuk dilelang. Penilaian dan pelelangan ini merupakan penilaian ulang dari yang sebelumnya tahun 2021 dan sudah dilelang namun belum berhasil terjual.

Sementara untuk peralatan kantor dan rumah tangga yang dipelihara, AC, komputer/laptop dan printer merupakan jenis yang memerlukan biaya paling besar dibanding peralatan lainnya seperti meubel, TV, CCTV dan kamera.

4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Riau merupakan fasilitasi terhadap urusan organisasi perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya saja, jumlah koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan

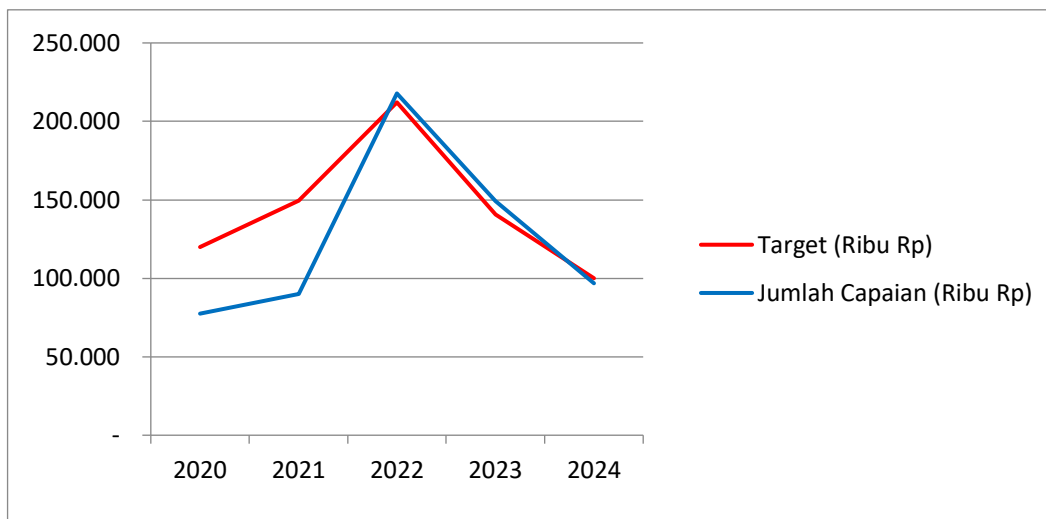
Penghubung belum tercatat dengan baik, sehingga belum dapat menggambarkan jumlah urusan yang sudah difasilitasi karena perhitungan koordinasi hanya berasal dari jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan pada Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Diantara pelayanan yang diberikan Badan Penghubung Provinsi Riau adalah pelayanan terhadap tamu Mess Pemda Riau di Jakarta dan Pelayanan tamu di Anjungan Riau TMII. Pelayanan tersebut erat kaitannya dengan target dan pencapaian penerimaan pada Badan Penghubung Provinsi Riau yang rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 2.17 Target dan Pencapaian Penerimaan**

No	Tahun	Target (ribu Rp)	Pencapaian					Rasio (%)
			Lainnya (Anj, ATM)		Mess		Jlh (Ribu Rp)	
			Jlh Keg	Ribu Rp	Jlh Tamu	Ribu Rp		
1	2020	119.800	-	12.000	120	65.500	77.500	64,69%
2	2021	149.675	-	13.875	140	76.175	90.050	60,16%
3	2022	212.140	-	101.075	233	116.750	217.825	102,68 %
4	2023	140.675	-	41.875	220	107.450	149.325	106,15 %
5	2024	100.025	-	28.525	52	68.300	96.825	96,80%
<b>Jumlah</b>		<b>622.290</b>		<b>197.350</b>		<b>434.175</b>	<b>534.700</b>	<b>85,92%</b>

Sumber Data : Perencanaan Badan Penghubung



Sumber Data : Perencanaan Badan Penghubung

**Gambar 2.7 Grafik Target dan Pencapaian Penerimaan**

Pencapaian penerimaan pada Badan Penghubung Provinsi Riau selama periode 2020 – 2022 sangat terpengaruh oleh terjadinya pandemi Covid-19 dimana terdapat pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengadakan kegiatan atau perjalanan. Kondisi mulai membaik di tahun 2022 sehingga aktifitas masyarakat kembali normal dan penerimaan di mess mengalami kenaikan. Selain itu penerimaan khususnya di Anjungan Riau juga dipengaruhi oleh adanya revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah, dimana hampir sepanjang tahun 2022 Taman Mini Indonesia Indah termasuk anjungan daerah ditutup dari aktifitas pengunjung.

Jika dilihat dari jumlah pencapaian penerimaan, terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Peningkatan pesat pada tahun 2022 dikarenakan ada pembayaran sewa ruang ATM Bank Riau Kepri untuk 3 tahun (2022, 2023, 2024) sebesar Rp. 90.000.000,-. Pada tahun 2023 dimana kondisi pandemi covid-19 telah dicabut, target ditetapkan setara dengan tahun 2021 dengan pencapaian melebihi 100%. Pencapaian penerimaan dibandingkan target pada periode 2020 – 2023 adalah sebesar 85,92%. Pencapaian penerimaan mess pada tahun 2023 ini berasal dari penggunaan 8 unit kamar, sementara 13 unit kamar lainnya tidak layak huni karena masalah pada AC, kamar mandi, dan lantai.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Riau selama periode 2021 – 2023, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 65.798.001.832,- selama periode tersebut realisasi fisik mencapai hampir 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dan realisasi keuangan rata-rata mencapai lebih dari 95% yang artinya bahwa penyerapan anggaran berjalan dengan baik. Data anggaran dan realisasi pencapaiannya berdasarkan laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.18 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau**

No	Tahun	Anggaran Renstra (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1	2021	20.371.779.747	19.557.452.857	96,00
2	2022	18.222.334.322	22.215.921.193	121,92
3	2023	18.402.657.516	24.024.627.782	130,55
4	2024	26.461.442.343	26.980.113.956	101,96
<b>Jumlah</b>		<b>83.458.213.928</b>	<b>92.778.115.788</b>	<b>111,16</b>

Sumber Data : Perencanaan Badan Penghubung

**Tabel 2.19 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung**

Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	0	19.280.757.018	17.019.209.825	17.162.657.516	17.730.692.879	(	18.474.417.326	20.447.435.882	21.431.507.207	11.327.287.749	0	96%	120%	125 %	107.7 %
<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.508.207.516	10.509.692.879	)	10.299.461.957	10.957.125.789	11.500.052.864	11.327.287.749	0	103 %	110%	109 %	107.7 %
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	10.000.000.000	10.000.000.000	10.508.207.516	10.509.692.879		10.299.461.957	10.957.125.789	11.500.052.864	11.327.287.749	0	103 %	110%	109 %	107.7 %
<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	0	42.212.035	42.000.000	60.000.000	70.000.000		57.667.000	-	-	-	0	137 %	0%	0%	0%
Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0	42.212.035	42.000.000	60.000.000	70.000.000		57.667.000	-	-	-	0	137 %	0%	0%	0%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	0	1.346.112.748	1.340.000.000	1.405.000.000	1.480.000.000		1.078.241.677	1.867.414.103	1.797.722.880	2.149.666.013	0	80%	139%	128 %	145.2 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	25.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000		39.997.700	84.083.342	49.974.514	65.451.745	0	160 %	210%	100 %	109.1 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	240.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		223.829.893	495.434.141	274.312.126	162.060.000	0	93%	248%	137 %	81.03 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	75.000.000	75.000.000		-	-	124.812.845	75.226.678	0	0%	0%	166 %	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	201.112.748	200.000.000	100.000.000	100.000.000		162.445.000	250.978.000	199.994.405	408.941.756	0	81%	125%	200 %	408.9 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	80.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		63.986.919	86.715.053	99.946.027	100.351.863	0	80%	87%	100 %	100 %
Fasilitas Kunjungan Tamu	0	-	-	100.000.000	150.000.000		-	-	256.170.500	294.141.200	0	-	-	256 %	196.1 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	800.000.000	800.000.000	780.000.000	795.000.000		587.982.165	950.203.567	792.512.463	1.043.492.771	0	73%	119%	102 %	131.25 %
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>80.000.000</b>		<b>24.500.000</b>	<b>108.270.000</b>	<b>49.939.269</b>	<b>1.206.413.550</b>	<b>0</b>	<b>49%</b>	<b>217%</b>	<b>100 %</b>	<b>1508 %</b>
Pengadaan Mebel	0	-	-	-	-		-	-	-	534.600.000		-	-	-	100 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000		24.500.000	108.270.000	49.939.269	427.813.550	0	49%	217%	100 %	534%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										244.000.000					100 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	0	3.020.181.523	2.873.247.048	3.266.000.000	3.266.000.000		2.841.253.459	2.949.456.526	3.133.329.678	3.000.774.302	0	94%	103%	96%	91,87 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	16.000.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000		9.099.500	12.372.000	14.761.650	13.943.242	0	57%	69%	92%	87,71 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	579.931.523	630.247.048	650.000.000	650.000.000		499.237.915	572.048.681	633.643.917	584.512.462	0	86%	91%	97%	89,92 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	2.424.250.000	2.225.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000		2.332.916.044	2.365.035.845	2.484.924.111	2.402.318.598	0	96%	106%	96%	92,39 %
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	0	4.822.250.712	2.713.962.777	1.873.450.000	2.325.000.000		4.173.293.233	4.565.169.464	4.950.462.516	5.371.540.139	0	87%	168%	264 %	231% %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	1.081.618.919	958.450.000	237.230.000	279.130.000		1.201.021.211	1.374.419.200	645.903.602	664.815.759	0	111 %	143%	272 %	238,17 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	-	110.000.000	831.220.000	920.870.000	-	108.909.646	1.249.016.190	1.184.168.647	0	0%	99%	150%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	50.000.000	80.000.000	50.000.000	60.000.000	65.000.000	122.248.885	93.470.000	143.064.000	0	130%	153%	187%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	3.690.631.793	1.565.512.777	675.000.000	975.000.000	2.907.272.022	2.959.591.733	2.805.207.524	3.379.491.733	0	79%	189%	416%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	80.000.000	90.000.000	-	-	156.865.200	0	0	0%	0%	196%		
<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>0</b>	<b>1.091.022.729</b>	<b>1.203.124.497</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>1.083.035.531</b>	<b>1.768.485.311</b>	<b>2.593.120.575</b>	<b>2.314.340.356</b>	<b>0</b>	<b>99,27%</b>	<b>146,99%</b>	<b>209,12%</b>		
<i>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>	<i>0</i>	<i>1.091.022.729</i>	<i>1.203.124.497</i>	<i>1.240.000.000</i>	<i>1.240.000.000</i>	<i>1.083.035.531</i>	<i>1.768.485.311</i>	<i>2.593.120.575</i>	<i>2.314.340.356</i>	<i>0</i>	<i>99,27%</i>	<i>146,99%</i>	<i>209,12%</i>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	0	206.022.729	253.124.497	300.000.000	300.000.000		245.718.600	517.991.270	600.406.697	660.611.918	0	119,27%	204,64%	200,14%	
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	0	485.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		432.289.908	583.561.968	813.012.380	853.784.633	0	89,13%	116,71%	162,60%	
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	0	250.000.000	300.000.000	320.000.000	320.000.000		262.346.823	485.846.650	1.039.101.586	716.401.856	0	104,94%	161,95%	324,72%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	0	150.000.000	150.000.000	120.000.000	120.000.000		142.680.200	181.085.423	140.599.912	83.541.949	0	95,12%	120,72%	117,17%	
		<b>20.371.779.747</b>	<b>18.222.334.322</b>	<b>18.402.657.516</b>	<b>18.970.692.879</b>		<b>19.557.452.857</b>	<b>22.215.921.193</b>	<b>24.024.627.782</b>	<b>25.370.022.109</b>	<b>*/</b>	<b>96,00%</b>	<b>121,92%</b>	<b>130,55%</b>	

Sumber Data : Perencanaan Badan Penghubung

## 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Badan Penghubung diantaranya :

- Gubernur dan Wakil Gubernur
- Pejabat eksekutif dan legislatif serta tokoh masyarakat Riau yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta dan sekitarnya.
- Lembaga Pemerintah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai urusan kedinasan di Pusat.
- Lembaga Non Pemerintah, diantaranya organisasi kemahasiswaan dan organisasi masyarakat Riau di Jakarta.
- Masyarakat Riau di Jakarta yang mempunyai kebutuhan fasilitasi urusan Pendidikan, Kesehatan, sosial, dll

## 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam memberikan pelayanan terhadap kelompok sasaran di atas, Badan Penghubung bekerjasama dan didukung oleh pihak-pihak berikut :

**Tabel 2.20 Tabel Mitra Perangkat Daerah**

No	Sasaran Layanan	Bentuk Layanan	Mitra Pendukung
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	Protokoler	Biro Administrasi Pimpinan
2	Lembaga Pemerintah	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi	Bappeda, BPKAD, BKD, Inspektorat, Bapenda, Biro Setda, Dinas Pariwisata, Dinas Budaya
3	Lembaga Non Pemerintah	Fasilitasi Kerjasama	Dispora
4	Masyarakat Riau di Jakarta	Fasilitasi urusan kemasyarakatan, promosi dan informasi	Dinsos, Disdik, Dinkes, Diskominfo, Manajemen TMII, Dekranasda

Sumber Data : Perencanaan Badan Penghubung

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Badan Penghubung sejauh ini belum ada.

## 2.6 Identifikasi Permasalahan

Pencapaian kinerja (IKU) pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau periode 2019 – 2024 mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2022 dan cenderung stabil hingga tahun 2024. Nilai IKU tersebut dapat dikatakan baik karena rata-rata kinerjanya mencapai 82,88%, namun terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

### 1. Akuntabilitas kinerja belum optimal

Pengukuran kinerja belum optimal dengan mempertimbangkan kondisi :

- Nilai target IKU yang sempurna 100% pada tahun 2020-2021 sangat sulit untuk diwujudkan.
- Target kinerja tidak diikuti oleh penentuan jenis layanan dan target volume pelayanan sehingga pencapaian nilai IKU tidak menggambarkan korelasinya dengan perkembangan organisasi baik kepegawaian maupun anggaran.

Pengukuran kinerja yang tidak optimal ini disebabkan oleh :

#### a. Proses perencanaan tidak disusun secara matang.

Proses perencanaan yang baik disusun secara bertahap dengan menetapkan target kinerja untuk masing-masing tahapan. Pemahaman terhadap apa yang menjadi target kinerja utama dan bagaimana cara mencapainya menjadi hal yang penting. Dalam kondisi ini, kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu, baik di tingkat pimpinan yang mempunyai kewenangan urusan, di sub bidang selaku pelaksana pelayanan dan di bagian perencanaan selaku yang merangkum dan merumuskan dokumen perencanaan

#### b. Pengukuran kinerja tidak maksimal

Pengukuran kinerja tidak maksimal karena pengisian kuesioner masih didominasi dengan cara yang

konvensional dan belum memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

c. Proses pengendalian dan evaluasi tidak maksimal.

Proses pengendalian dan evaluasi tidak maksimal disebabkan oleh belum adanya jadwal yang jelas dan hasil evaluasi belum digunakan sebagai bahan penyusunan anggaran dan perencanaan tahun berikutnya.

2. Minimnya kontribusi jumlah pengunjung dan event yang terselenggara di Anjungan Riau TMII terhadap penerimaan daerah.

Aktifitas anjungan daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengelola TMII. Berdasarkan laporan tahun 2024 Subbid Pengelola Anjungan Riau, jumlah pengunjung adalah 43.955 pengunjung lokal dan 1.760 pengunjung mancanegara atau rata-rata 3.809 orang per bulan, atau 127 orang per hari. Rumah Selasar Jatuh Tunggal sebagai galeri merupakan tempat terbanyak yang dikunjungi wisatawan, biasanya pengunjung adalah rombongan pelajar dan wisatawan mancanegara. Saat ini kondisi galeri tidak cukup representative seperti :

- Koleksi yang tidak lengkap, belum terdata secara rinci dan tidak terawat dengan baik.
- Tidak ada biaya pengelolaan rutin.
- Tidak ada pegawai yang bertugas secara khusus.

Keberadaan Museum di Anjungan Daerah menjadi suatu hal yang penting karena akan mempunyai standar pengelolaan yang jelas dan terukur, dan galeri di Rumah Selasar Jatuh Tunggal ini belum memenuhi persyaratan standar pengelolaan.

Berdasarkan laporan Subbid Pengelola Anjungan Riau tahun 2024, jumlah *event* yang terselenggara di Anjungan Riau

adalah 9 *event* atau pagelaran. Dalam kurun waktu 2019 – 2024, *event* yang diselenggarakan di Anjungan Riau rata-rata kurang dari 20 *event* per tahun. Ketergantungan aktifitas *event* di Anjungan Riau pada anggaran daerah, mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap jumlah *event* yang terselenggara. Hal ini dapat diasumsikan bahwa potensi yang dimiliki Anjungan Riau belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Anjungan Riau mempunyai potensi sebagai *show window* promosi pariwisata seni budaya dan produk unggulan daerah serta sebagai objek penerimaan daerah. Sebagai *show window*, Anjungan Riau sampai saat ini belum mempunyai data yang dapat menunjukkan pengaruh anjungan Riau terhadap peningkatan pariwisata, seni budaya dan produk unggulan daerah. Sehingga yang saat ini dapat diukur yaitu penerimaan daerah yang berasal dari Anjungan Riau. Dalam periode 2020-2024, jumlah penerimaan yang berasal dari Anjungan Riau adalah Rp. 107.350.000,- atau rata-rata Rp. 21.470.000,- pertahun. Nilai ini tentu sangat minim dibanding setidaknya belanja pegawai Anjungan Riau. Meskipun keberadaan Anjungan Riau tidak diposisikan sebagai sumber penghasilan daerah yang dinilai dengan penerimaan redistribusi, namun belum analisis yang mendalam tentang pengaruh anjungan terhadap peningkatan pariwisata, seni budaya dan produk unggulan daerah serta penerimaan daerah yang proporsional merupakan.

3. Rendahnya partisipasi OPD/ Instansi Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam memanfaatkan fasilitas urusan pada Badan Penghubung

Badan Penghubung sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, mempunyai fungsi

koordinasi dengan dinas/instansi Kabupaten/ Kota Provinsi Riau. Hal ini bisa memberikan efisiensi dan mempermudah urusan daerah di pusat, karena aktifitas urusan tersebut akan difasilitasi oleh Badan Penghubung Provinsi Riau. Dari semua potensi fasilitasi yang bisa dilaksanakan Badan Penghubung, masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Fasilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Riau dapat dibagi sebagai berikut :

- Fasilitasi pelayanan masyarakat, pelajar/mahasiswa Riau di ibukota dan sekitarnya.
- Fasilitasi koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat dalam mendukung perkembangan daerah.
- Fasilitasi protokoler pejabat daerah di ibukota dan sekitarnya.
- Fasilitasi kehumasan.

Dari fasilitasi di atas, fasilitasi protokoler dapat berjalan secara optimal karena jumlah pejabatnya yang sedikit dan prosedur layanan yang sudah jelas. Sementara untuk fasilitasi yang lain, belum mempunyai tolok ukur yang jelas tentang pengukuran kinerja, kapasitas yang dimiliki Badan Penghubung untuk melakukan pelayanan, batasan pelayanan yang bisa diberikan, potensi tumpang tindih urusan dengan OPD lain yang belum diselesaikan. Hal ini diasumsikan tkarena posisi peran Badan Penghubung yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada OPD/instansi di daerah.

Permasalahan yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Riau dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.21 Pokok Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas kinerja belum optimal	Proses perencanaan kurang matang	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia
	Pengukuran kinerja belum optimal	Pengisian kuesioner masih dominan dengan konvensional
	Pengendalian dan evaluasi belum optimal	Pengendalian dan evaluasi belum terjadwal secara jelas
Minimnya kontribusi jumlah pengunjung dan event yang terselenggara di Anjungan Riau TMII terhadap penerimaan daerah	Tingkat kunjungan anjungan daerah masih sangat dipengaruhi oleh kegiatan TMII	Belum adanya kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak pengelola TMII
	Ketergantungan kepada anggaran daerah	Justifikasi anggaran belum baik
	Fasilitas anjungan belum lengkap dan baik	Belum ada museum atau ruang pameran yang terstandar
		Sarana prasarana belum baik dan lengkap
	Pelayanan belum optimal	Tidak ada pegawai yang memiliki kualifikasi pramuwisata
		Informasi tentang kegiatan dan benda seni budaya masih minim baik secara konvensional maupun digital
		Belum ada SOP dan Standar Pelayanan yang memadai
Rendahnya partisipasi OPD/ Instansi Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam memanfaatkan fasilitasi urusan pada Badan Penghubung	Posisi Badan Penghubung sebagai OPD di Jakarta belum cukup kuat	Tupoksi Badan Penghubung pada Peraturan Gubernur belum dielaborasi secara jelas untuk memperkuat posisi Badan Penghubung
	Koordinasi antar OPD dan K/L belum maksimal	Masih terbatasnya pemahaman terkait pembagian urusan
	Pelayanan fasilitasi yang belum optimal	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia
		Sarana prasarana fasilitasi yang belum memadai
		Belum komprehensifnya SOP

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		dan Standar Pelayanan
	Kegiatan pelayanan masih tergantung kepada anggaran daerah	Justifikasi anggaran belum baik

## 2.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung atau tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Isu strategis disusun mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah. Isu strategis yang berkembang dan aktual terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada Badan Penghubung Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat belum optimal.

Badan Penghubung merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di pemerintahan pusat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Namun tugas ini belum optimal dilaksanakan, diantaranya karena posisi peran Badan Penghubung yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada OPD/instansi di daerah.

Badan Penghubung mempunyai peran penting di Jakarta sebagai ibukota, yang merupakan peluang dan tantangan bagi Badan Penghubung Provinsi Riau. Keberadaan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi belum bisa dimanfaatkan oleh Badan Penghubung untuk melakukan fasilitasi promosi secara lebih maksimal. Keberadaan Jakarta sebagai pusat

pemerintahan juga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memfasilitasi segala urusan pemerintahan daerah, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kelautan, kehutanan, pertanian, perkebunan dan lainnya.

## 2. Tata kelola Anjungan Riau belum optimal

Pengelolaan Anjungan Riau menjadi salah satu isu strategis setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dimana peraturan ini mengalihkan pengelolaan bangunan dan asset TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Sekretaris Negara. Perpindahan pengelolaan ini mengakibatkan terjadinya restrukturisasi manajemen TMII yang berimbas pada peningkatan struktur dan fungsi Anjungan Daerah di dalamnya.

Kondisi ini menjadi penting karena akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan fasilitasi kepada masyarakat dalam jangka panjang. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Anjungan Riau sulit berkembang jika struktur dan fungsinya tidak mengalami perbaikan.

**Tabel 2.22 Analisis Isu Strategis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Anjungan Riau TMII	Minimnya Even yang terselenggara di Anjungan TMII	-	-	-	-	Tata kelola Anjungan Riau belum optimal
Domisili Badan Penghubung di Pusat Pemerintahan	Rendahnya partisipasi OPD/instansi/ Kab -Kota dalam memanfaatkan Fasilitasi urusan pada Badan Penghubung	-	-	-	-	Koordinasi dan Kolaborasi Antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau dan Kabupaten /Kota dengan Badan Penghubung belum optimal

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian penjabaran dari Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitu 5.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Dari sasaran RPJMD tersebut, Badan Penghubung Provinsi Riau menetapkan Tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung”**

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau. Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari penjabaran Outcome RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas.

Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG</b>											
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung		IKM terhadap pelayanan Badan Penghubung (Nilai)	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder (Nilai)	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	67,1	67,5	68	69	70	71	72	

Sumber Data : SIPD RI Kemendagri

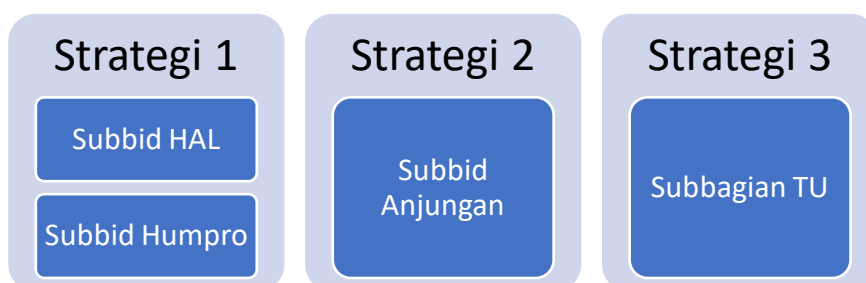
### 3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025 - 2029

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi Perangkat Daerah / Instansi Provinsi, Kabupaten, Kota dan masyarakat Riau dalam memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung Provinsi Riau.
2. Meningkatkan jumlah kunjungan dan event/kegiatan di Anjungan Riau TMII.
3. Memperbaiki pengelolaan data dan dokumen unsur penilaian akuntabilitas perangkat daerah.

Dalam hal optimalisasi sumber daya, strategi yang disusun harus dapat mengakomodir dan menggerakkan secara aktif semua pegawai, dengan bagan kerja sebagai berikut :



**Gambar 3.1 Bagan Kerja Strategi Badan Penghubung Provinsi Riau**

### 3.3 Pentahapan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi juga harus dilaksanakan mempertimbangkan pencapaian kinerja yang bertahap dan konsisten tiap tahun. Tahapan pencapaian yang harus diperhatikan yaitu :

**Tabel 3.2 Tahapan Pencapaian Strategi**

No	Pencapaian	Th ke-1	Th ke-2	Th ke-3	Th ke-4	Th ke-5
1	Peningkatan Jumlah Fasilitas	5%	5%	5%	5%	5%
2	Peningkatan Jumlah Pengunjung	10%	10%	10%	10%	10%
	Peningkatan Jumlah Event	10%	10%	10%	10%	10%
3	Peningkatan nilai akuntabilitas	1 poin	1 poin	1 poin	1 poin	1 poin

Tahapan strategi yang dijalankan juga harus mempunyai fokus terhadap objek yang menjadi urusannya, dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Fasilitas Badan Penghubung Provinsi Riau difokuskan pada urusan yang melibatkan OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan masyarakat Riau.
2. Jumlah kunjungan dan event di Anjungan Riau dapat dicapai melalui kegiatan yang menjadi rutinitas aktifitas anjungan daerah dan taman mini, selanjutnya dari kegiatan pembelajaran seni budaya, dan kemudian dengan kegiatan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota atau lembaga dan instansi pemerintah lainnya atau pihak swasta, dan kegiatan masyarakat secara pribadi atau kelompok.
3. Penilaian akuntabilitas diperoleh pada fokus kegiatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi baik secara materi maupun administrasi.

**Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah**

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Meningkatkan koordinasi dengan OPD Provinsi	Meningkatkan koordinasi dengan K/L	Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan pada masyarakat	Mempertahankan koordinasi dengan OPD Provinsi, K/L dan Kab/Kota pelayanan pada masyarakat
Mempertahankan kegiatan rutin anjungan dan TMII	kegiatan pembelajaran seni budaya	kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota atau lembaga dan instansi pemerintah lainnya	Kolaborasi yang melibatkan pihak swasta, dan kegiatan masyarakat secara pribadi atau kelompok	Kolaborasi yang berorientasi ekonomi
Memperbaiki proses perencanaan & penganggaran	Memperbaiki proses pengukuran dan pelaporan	Memperbaiki proses evaluasi	Meningkatkan kapasitas pelayanan	Mempertahankan akuntabilitas kinerja OPD

### 3.4 Lokus

Dari sisi lokus pelayanan, strategi Badan Penghubung Provinsi Riau yaitu :

**Tabel 3.4 Lokus Pelayanan Strategi Badan Penghubung Provinsi Riau**

Strategi	Lokus Pelayanan
Strategi 1	DKI Jakarta dan sekitarnya, untuk beberapa pelayanan juga dilakukan mencakup area pulau Jawa
Strategi 2	Anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah. Beberapa kegiatan kolaborasi bisa juga dilaksanakan di tempat lain.
Strategi 3	Kantor Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta

Keseluruhan strategi ini akan ditindaklanjuti dengan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.

### **3.5 Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun. Arah kebijakan renstra Badan Penghubung Provinsi Riau menyelaraskan dengan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Riau yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.

Arah Kebijakan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan masyarakat, pelajar/mahasiswa Riau di ibukota dan sekitarnya.

Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara :

- a. Melakukan pendataan organisasi masyarakat Riau dan organisasi mahasiswa beserta keanggotaannya.
  - b. Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan mahasiswa secara berkala untuk menjaring potensi mendukung pembangunan daerah.
  - c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam optimalisasi fasilitasi pelayanan untuk masyarakat Riau di ibukota dan sekitarnya.
  - d. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat Riau di ibukota
2. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat dalam mendukung perkembangan daerah.

Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara :

- a. Melakukan kaji ulang terhadap posisi Badan Penghubung dalam perannya mendukung pembangunan daerah.
  - b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga yang dapat memberikan dukungan pembangunan daerah.
  - c. Melakukan koordinasi secara intensif dengan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang fasilitasi urusan pemerintahan daerah di Jakarta.
3. Peningkatan efektifitas pelaksanaan protokoler pejabat daerah di ibukota dan sekitarnya.

Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara :

- a. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan keprotokolan
  - b. Menyediakan peralatan tugas protokoler yang proporsional
  - c. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas protokoler
4. Peningkatan kapasitas dan jangkauan kegiatan kehumasan untuk mendukung menyampaikan informasi perkembangan daerah.

Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai dalam melaksanakan tugas kehumasan.
- b. Menyediakan peralatan kehumasan yang proporsional.
- c. Menggunakan media sosial dan platform digital lainnya secara optimal.
- d. Memperluas jangkauan layanan kehumasan diluar aktifitas pejabat dengan menjaring informasi dan fenomena sosial, politik, ekonomi, lingkungan, seni budaya Provinsi Riau di ibukota dan sekitarnya.

- e. Meningkatkan kualitas koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait informasi daerah yang dapat disampaikan ke masyarakat.
  - f. Menyediakan layanan pusat informasi daerah di ibukota.
5. Peningkatan peran Anjungan Riau sebagai wahana pembelajaran seni kebudayaan Melayu, sumber penerimaan daerah, serta media promosi wisata, seni budaya dan produk unggulan daerah.

Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara :

- a. Mengatur jadwal kerja pegawai dengan jam operasional TMII.
  - b. Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan pegawai sebagai pemandu.
  - c. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap fasilitas, gedung dan benda seni budaya.
  - d. Melengkapi informasi secara konvensional maupun digital tentang gedung dan benda seni budaya.
  - e. Menyusun program pembelajaran seni budaya Melayu.
  - f. Meningkatkan kerjasama dgn Pengelola TMII dalam memaksimalkan potensi anjungan untuk penerimaan.
  - g. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform digital lainnya sebagai sarana promosi.
  - h. Menggunakan sarana digital untuk pengukuran jumlah dan kepuasan pengunjung.
  - i. Menyusun usulan pembentukan museum dan melengkapi koleksi benda sejarah dan seni budaya Riau.
6. Peningkatan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah.
- Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara :
- a. Melakukan penyusunan perencanaan kinerja yang rasional, implementatif, dan terukur.
  - b. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yg proporsional.

- c. Melakukan penyusunan laporan kinerja secara berkala sesuai data fakta di lapangan.
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten
- e. Melaksanakan pembagian tugas yg proporsional untuk mendukung pencapaian kinerja.
- f. Melakukan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan secara terstruktur dan efektif.

Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025 – 2029**

<b>ISU STRATEGIS :</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Kolaborasi Antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau dan Kabupaten /Kota dengan Badan Penghubung tidak optimal.</li> <li>2. Tata kelola Anjungan Riau belum optimal.</li> <li>3. Pengukuran kinerja belum optimal.</li> </ol>							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Kebijakan</b>	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung	1	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	1.1	Meningkatkan partisipasi Perangkat Daerah / Instansi Provinsi, Kabupaten, Kota dan masyarakat Riau dalam memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung Provinsi Riau	1.1.1	Peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan masyarakat, pelajar/mahasiswa Riau di ibukota dan sekitarnya
						1.1.2	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan kementrian/lembaga pemerintah pusat dalam mendukung perkembangan daerah
						1.1.3	Peningkatan efektifitas pelaksanaan protokoler pejabat daerah di ibukota dan sekitarnya

Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
						<b>1.1.4</b>	Peningkatan kapasitas dan jangkauan kegiatan kehumasan untuk mendukung menyampaikan informasi perkembangan daerah
						<b>1.1.5</b>	Peningkatan kapasitas dan jangkauan kegiatan kehumasan untuk mendukung menyampaikan informasi perkembangan daerah
				<b>1.2</b>	Meningkatkan jumlah kunjungan dan event/kegiatan di Anjungan Riau TMII	<b>1.2.1</b>	Peningkatan peran Anjungan Riau sebagai wahana pembelajaran seni kebudayaan Melayu, sumber penerimaan daerah, serta media promosi wisata, seni budaya dan produk unggulan daerah
		<b>2</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	<b>2.1</b>	Memperbaiki pengelolaan data dan dokumen unsur penilaian akuntabilitas perangkat daerah	<b>2.1.1</b>	Peningkatan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah

**Tabel 3.6 Perumusan Arah Kebijakan Renstra**

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas	Peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan masyarakat, pelajar/mahasiswa Riau di ibukota dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendataan organisasi masyarakat riau dan organisasi mahasiswa beserta keanggotaannya.</li> <li>b. Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan mahasiswa secara berkala untuk menjaring potensi mendukung pembangunan daerah.</li> <li>c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga dalam melakukan fasilitasi pelayanan untuk masyarakat Riau di ibukota dan sekitarnya.</li> <li>d. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat riau di ibukota</li> </ul>
		Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat dalam mendukung perkembangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kaji ulang terhadap posisi Badan Penghubung dalam perannya mendukung pembangunan daerah.</li> <li>b. Melakukan koordinasi secara intensif ke kementerian/lembaga yang dapat memberikan dukungan pembangunan daerah.</li> <li>c. Melakukan koordinasi secara intensif ke perangkat daerah provinsi, kabupaten, kota tentang fasilitasi urusan pemerintahan daerah</li> </ul>

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan protokoler pejabat daerah di ibukota dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan terkait keprotokolan</li> <li>b. Menyediakan peralatan tugas protokoler yang proporsional</li> <li>c. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas protokoler</li> </ul>
		Peningkatan kapasitas dan jangkauan kegiatan kehumasan untuk mendukung menyampaikan informasi perkembangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugas kehumasan.</li> <li>b. Menyediakan peralatan kehumasan yang proporsional.</li> <li>c. Menggunakan media sosial dan platform digital lainnya secara optimal.</li> <li>d. Memperluas jangkauan layanan kehumasan diluar aktifitas pejabat dengan menjaring fenomena sosial, politik, ekonomi, lingkungan, seni, budaya Provinsi Riau di ibukota dan sekitarnya</li> <li>e. Berkoordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait informasi daerah yang dapat disampaikan ke masyarakat.</li> <li>f. Menyediakan layanan pusat informasi daerah di ibukota.</li> </ul>

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
		<p>Peningkatan peran Anjungan Riau sebagai wahana pembelajaran seni kebudayaan Melayu, sumber penerimaan daerah, serta media promosi wisata, seni budaya dan produk unggulan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyesuaikan jam kerja pegawai dengan jam operasional TMII.</li> <li>b. Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan pegawai sebagai pemandu.</li> <li>c. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap fasilitas, gedung dan benda seni budaya.</li> <li>d. Melengkapi informasi secara langsung maupun digital tentang gedung dan benda seni budaya.</li> <li>e. Menyusun program pembelajaran seni budaya Melayu.</li> <li>f. Melakukan kerjasama dgn TMII dalam memaksimalkan potensi anjungan untuk penerimaan.</li> <li>g. Menggunakan media sosial dan platform digital lainnya secara optimal.</li> <li>h. Menggunakan sarana digital utk pengukuran jumlah dan kepuasan pengunjung.</li> <li>i. Menyusun usulan pembentukan museum dan melengkapi koleksi benda sejarah dan seni budaya Riau</li> </ul>

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
		Peningkatan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyusunan perencanaan kinerja yang rasional, implementatif, dan terukur.</li> <li>b. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yg proporsional.</li> <li>c. Melakukan penyusunan laporan kinerja secara berkala sesuai data fakta di lapangan.</li> <li>d. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten</li> <li>e. Melaksanakan pembagian tugas yg proporsional untuk mendukung pencapaian kinerja.</li> <li>f. Melakukan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan secara efektif</li> </ul>

## **BAB IV**

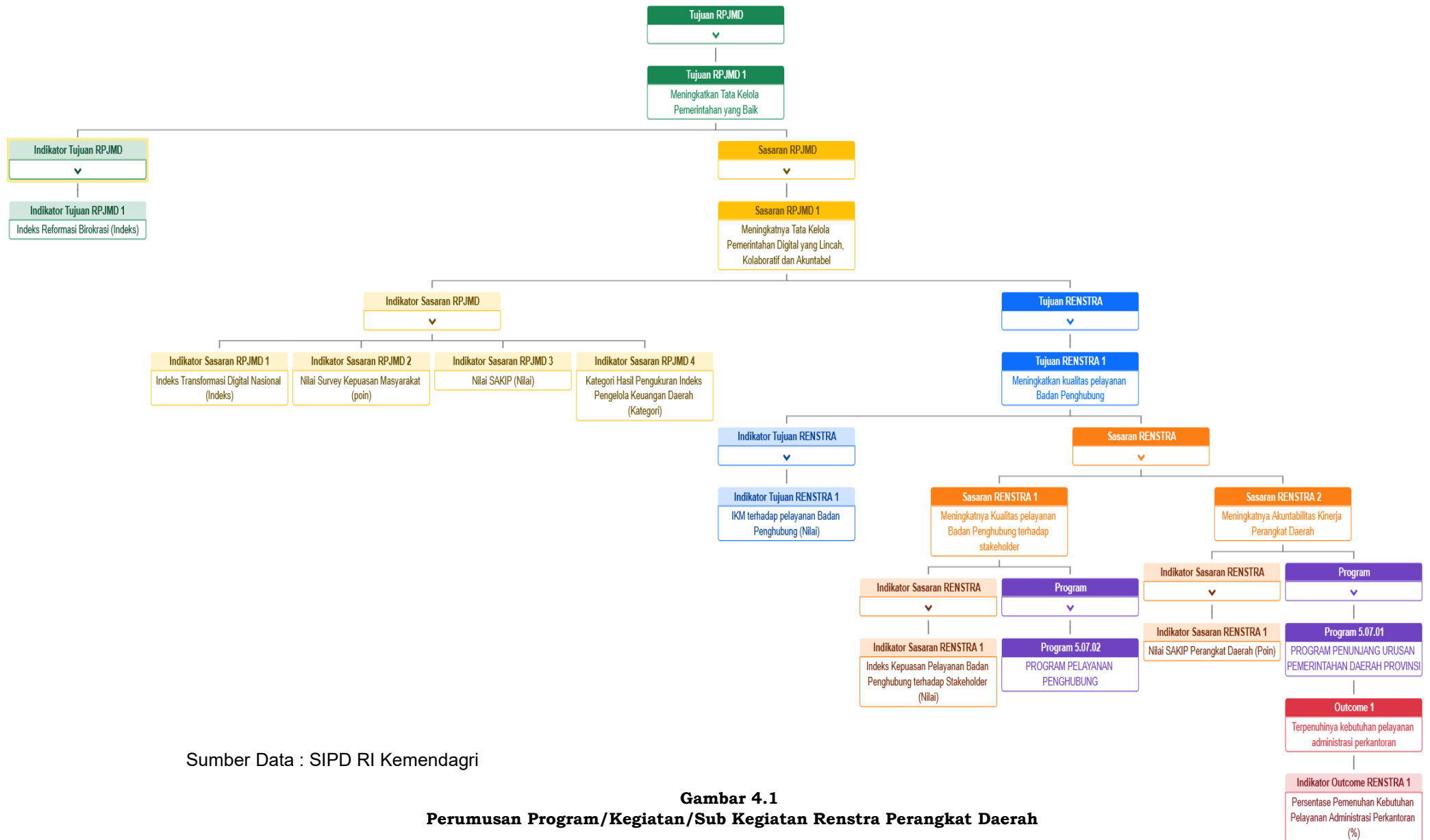
### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, out come dan out put serta mengacu kepada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri berserta pemutakhirannya

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi untuk menguraikan secara rinci bagaimana program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh Perangkat Daerah. Narasi ini menjelaskan langkah-langkah operasional, indikator kinerja, serta target waktu yang akan dicapai dalam setiap kegiatan. Program pada Badan Penghubung Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

#### **4.1 Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar, yang memiliki kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif sendiri. Pagu indikatif adalah perkiraan awal anggaran yang dialokasikan untuk suatu kegiatan atau subkegiatan, yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja, Rencana Subkegiatan dan Pendanaan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :



Sumber Data : SIPD RI Kemendagri

**Gambar 4.1**  
**Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**

**Tabel 4.1 PROGRAM PERANGKAT DERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					19.615.693.980		20.335.855.292		20.985.462.501		21.651.777.129		22.220.125.456	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.688.540.973		19.416.878.445		20.024.772.393		20.648.118.580		21.185.245.360	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Penghubung (Persentase)	100	100	100	18.688.540.973	100	19.416.878.445	100	20.024.772.393	100	20.648.118.580	100	21.185.245.360	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					927.153.007		918.976.847		960.690.108		1.003.658.549		1.034.880.096	
Meningkatnya Layanan Terhadap Stakeholder	Persentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persentase)	100	100	100	927.153.007	100	918.976.847	100	960.690.108	100	1.003.658.549	100	1.034.880.096	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
TOTAL KESELURUHAN					19.615.693.980		20.335.855.292		20.985.462.501		21.651.777.129		22.220.125.456	

Sumber Data : SIPD RI Kemendagri

**Tabel 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN  
RENSTRA PD PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung	Meningkatnya Kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Meningkatnya Layanan Terhadap Stakeholder		IKM terhadap pelayanan Badan Penghubung		
					Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder		
					Persentase Layanan Terhadap Stakeholder	5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	
				Jumlah Layanan terhadap stakeholder	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
				Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
				Jumlah Layanan terhadap stakeholder	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
				Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	5.07.02.1.01.0003 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk  Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Penghubung	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ARG
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.07.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.07.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.07.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.07.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

Sumber Data : SIPD RI Kemendagri

**Tabel 4.3 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG				19.615.631.989,00		20.335.855.292,00		20.985.462.501,00		21.651.777.129,00		22.220.125.456,00		
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.688.473.807,00		19.416.878.445,00		20.024.772.393,00		20.648.118.580,00		21.185.245.360,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	18.688.473.807,00	100	19.416.878.445,00	100	20.024.772.393,00	100	20.648.118.580,00	100	21.185.245.360,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN PENGHUBUNG	
5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00		
5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00		
5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.893.331.535,00		10.897.278.445,00		10.937.172.393,00		11.130.518.580,00		11.432.645.360,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	65	75	10.893.331.535,00	77	10.897.278.445,00	77	10.937.172.393,00	77	11.130.518.580,00	77	11.432.645.360,00		
5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.893.331.535,00		10.897.278.445,00		10.937.172.393,00		11.130.518.580,00		11.432.645.360,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	65	75	10.893.331.535,00	77	10.897.278.445,00	77	10.937.172.393,00	77	11.130.518.580,00	77	11.432.645.360,00		
5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				31.992.272,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	31.992.272,00	2	35.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	55.000.000,00		
5.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				31.992.272,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	31.992.272,00	2	35.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	55.000.000,00		
5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.295.000.000,00		1.435.000.000,00		1.683.000.000,00		1.803.000.000,00		1.803.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	1.295.000.000,00	2	1.435.000.000,00	2	1.683.000.000,00	2	1.803.000.000,00	2	1.803.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
5.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00		
5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6	60.000.000,00	6	75.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	9	300.000.000,00	9	300.000.000,00	9	320.000.000,00	9	350.000.000,00	9	350.000.000,00		
5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	75.000.000,00	3	85.000.000,00	3	85.000.000,00		
5.07.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450.000.000,00		550.000.000,00		675.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	450.000.000,00	1	550.000.000,00	1	675.000.000,00	1	740.000.000,00	1	740.000.000,00		
5.07.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	35.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00		
5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	6	200.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2					
5.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
5.07.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
5.07.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.226.000.000,00		4.226.000.000,00		4.226.000.000,00		4.226.000.000,00		4.226.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	4.226.000.000,00	1	4.226.000.000,00	1	4.226.000.000,00	1	4.226.000.000,00	1	4.226.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					
5.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00		
5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00		
5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00		
5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.932.150.000,00		2.453.600.000,00		2.748.600.000,00		3.058.600.000,00		3.283.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	27	1.932.150.000,00	27	2.453.600.000,00	27	2.748.600.000,00	27	3.058.600.000,00	27	3.283.600.000,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	24		24		24		24		24			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	80		90		90		90		90			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	3		5		6		7		8			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		7		8		8			
5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				450.000.000,00		490.000.000,00		540.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	450.000.000,00	6	490.000.000,00	7	540.000.000,00	8	600.000.000,00	8	650.000.000,00		
5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				688.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		950.000.000,00		1.075.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	27	688.000.000,00	27	750.000.000,00	27	850.000.000,00	27	950.000.000,00	27	1.075.000.000,00		
5.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				45.000.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	24	45.000.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00		
5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.150.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	80	99.150.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00		
5.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000,00		955.000.000,00		1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	3	600.000.000,00	5	955.000.000,00	6	1.100.000.000,00	7	1.250.000.000,00	8	1.300.000.000,00		
5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				927.158.182,00		918.976.847,00		960.690.108,00		1.003.658.549,00		1.034.880.096,00		
Meningkatnya Layanan Terhadap Stakeholder	Persentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persentase)	100	100	927.158.182,00	100	918.976.847,00	100	960.690.108,00	100	1.003.658.549,00	100	1.034.880.096,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN PENGHUBUNG	
5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				927.158.182,00		918.976.847,00		960.690.108,00		1.003.658.549,00		1.034.880.096,00		
Jumlah Layanan terhadap stakeholder	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	1	4	652.158.182,00	4	643.976.847,00	4	685.690.108,00	4	703.658.549,00	4	730.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	1	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	1	8		8		8		8					
5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				300.000.000,00		296.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	1	8	300.000.000,00	8	296.000.000,00	8	310.000.000,00	8	320.000.000,00	8	330.000.000,00		
5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				302.158.182,00		297.976.847,00		325.690.108,00		333.658.549,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	1	4	302.158.182,00	4	297.976.847,00	4	325.690.108,00	4	333.658.549,00	4	350.000.000,00		
5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	1	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	300.000.000,00	4	304.880.096,00		
	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	1	4		4		4		4					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07.02.1.01.0003 - Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		254.880.096,00		
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	1	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00	4	250.000.000,00	4	254.880.096,00		
5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		

Sumber Data : SIPD RI Kemendagri

## 4.2 Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Badan Penghubung Provinsi Riau mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dari sisi non urusan sedangkan Program Pelayanan Badan Penghubung tidak termasuk dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah, sehingga tidak memiliki Sub kegiatan yg masuk kedalam Program tersebut.

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Provinsi Riau**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

Sumber Data : SIPD RI Kemendagri

## 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penghubung Riau 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Riau**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder	Nilai	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
2.	Nilai SAKIP	poin	67,1	67,5	68	69	70	71	72	

Sumber Data : SIPD RI Kemendagri

#### 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Badan Penghubung, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Badan Penghubung ke depan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Badan Penghubung Provinsi Riau, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penghubung merupakan indikator urusan yaitu :

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Layanan Terhadap Stakeholder	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber Data : SIPD RI Kemendagri

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025 – 2029 disusun pada situasi dan kondisi yang spesial karena berada pada masa setelah transisi dan pilkada serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Proses penyusunan Renstra sudah berjalan selaras dengan berpedoman Dokumen RPJMD Provinsi Riau. Periode Renstra 2025-2029 menjadi perhatian penting karena menjadi tahapan pertama dalam pelaksanaan RPJPD 2025 – 2045.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Riau, Karena itu, harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disusun dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja tahunan dapat merespon secara inklusif pencapaian target kinerja Badan Penghubung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA Badan Penghubung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam laporan kinerja (LKjIP) Badan Penghubung. LKjIP itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Badan Penghubung di masa yang akan datang.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penghubung Provinsi Riau, karena akan menentukan keberhasilan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian Rencana Strategis ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan

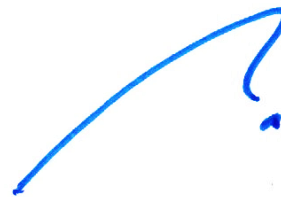
pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
**Badan Penghubung akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Renstra secara responsif gender**

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Riau ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk rencana kerja Badan Penghubung

Jakarta, 28 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI RIAU



RIDHO ADRIANSYAH, S.STP  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19830914 200112 1 005

# Metadata Indikator Kinerja Utama

## 1. Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder

### Institusi Penghasil:

Badan Penghubung Provinsi Riau

### Definisi

Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada pengguna layanan.

### Interpretasi

#### Interpretasi Nilai

Nilai Interval	Kategori	Interpretasi Umum
88,31 - 100	Sangat Baik	Pengguna sangat puas dengan pelayanan sangat baik, kebutuhan dan harapan pengguna layanan terpenuhi dengan sangat baik
76,61 – 88,30	Baik	Pengguna puas dengan pelayanan yang baik, kebutuhan dan harapan pengguna layanan terpenuhi dengan baik
65,0 – 76,60	Kurang Baik	Pengguna kurang puas, sebagian besar unsur layanan belum sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan
25 – 64,99	Tidak Baik	Pengguna tidak puas pelayanan dinilai buruk, perlu perbaikan unsur layanan secara menyeluruh

### Metode/Rumus Perhitungan

Hasil penilaian persepsi layanan pada setiap unsur layanan yang dikumpulkan melalui survey kepuasan kepada pengguna layanan dikategorikan dalam skala likert 1 – 4. Total nilai persepsi pada unsur layanan dikonversikan menjadi nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Formula IKM pada unit layanan :

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur Layanan}}{\text{Total Nilai Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Total Nilai Unsur

Hasil IKM yang diperoleh dari perhitungan menggunakan skala nilai tertentu kemudian **dikonversi ke dalam bentuk persen (skala 100)** untuk memudahkan interpretasi dan pelaporan. Metode survey, perhitungan penilaian persepsi, rekapitulasi dan interpretasi IKM mengacu pada Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Ukuran/Satuan: Persen

Judul Publikasi/Sumber Data:

Badan Penghubung (Pemerintah).

Tahun Data Tersedia: Tahunan

Level Estimasi: Nasional/Provinsi

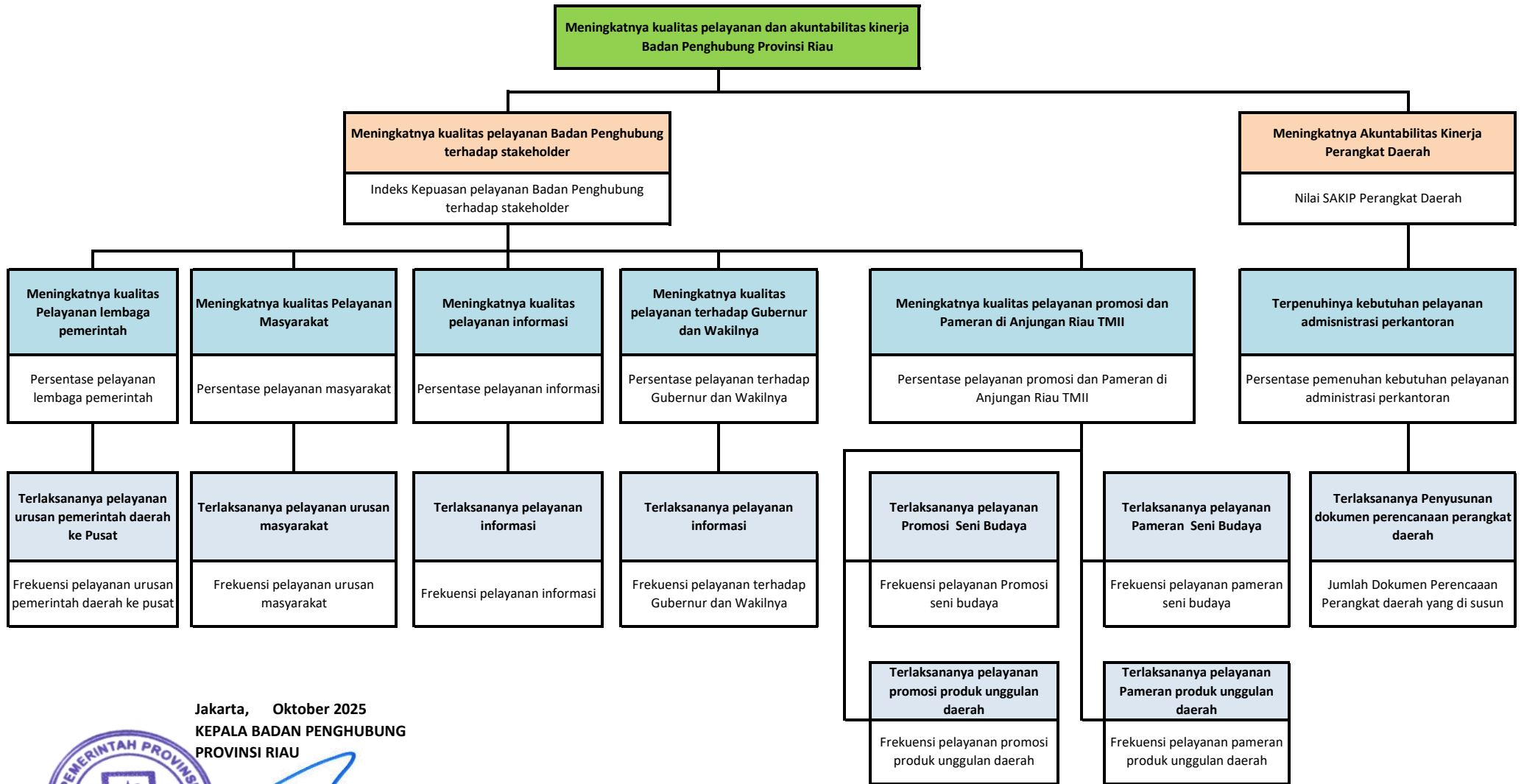
Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG</b>											
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung		IKM terhadap pelayanan Badan Penghubung (Nilai)	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder (Nilai)	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	67,1	67,5	68	69	70	71	72	

**POHON KINERJA  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU TAHUN 2025**



Jakarta, Oktober 2025  
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
 PROVINSI RIAU**



**RIDHO ADRIANSYAH, S.STP**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19830914 200112 1 005

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					19.615.631.989,00		20.335.855.292,00		20.985.462.501,00		21.651.777.129,00		22.220.125.456,00	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.688.473.807,00		19.416.878.445,00		20.024.772.393,00		20.648.118.580,00		21.185.245.360,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	18.688.473.807,00	100	19.416.878.445,00	100	20.024.772.393,00	100	20.648.118.580,00	100	21.185.245.360,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					927.158.182,00		918.976.847,00		960.690.108,00		1.003.658.549,00		1.034.880.096,00	
Meningkatnya Layanan Terhadap Stakeholder	Persentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persentase)	100	100	100	927.158.182,00	100	918.976.847,00	100	960.690.108,00	100	1.003.658.549,00	100	1.034.880.096,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
TOTAL KESELURUHAN					19615631989,00		20335855292,00		20985462501,00		21651777129,00		22220125456,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
<b>5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG</b>								
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung				IKM terhadap pelayanan Badan Penghubung (Nilai)			
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder			Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder (Nilai)			
			Meningkatnya Layanan Terhadap Stakeholder		Persentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persentase)	5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		
				Jumlah Layanan terhadap stakeholder	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
					Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
					Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
					Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
				Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01.0003 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.07.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG				19.615.631.989,00		20.335.855.292,00		20.985.462.501,00		21.651.777.129,00		22.220.125.456,00		
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.688.473.807,00		19.416.878.445,00		20.024.772.393,00		20.648.118.580,00		21.185.245.360,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	18.688.473.807,00	100	19.416.878.445,00	100	20.024.772.393,00	100	20.648.118.580,00	100	21.185.245.360,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN PENGHUBUNG	
5.07.01.1.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00		
5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00		
5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.893.331.535,00		10.897.278.445,00		10.937.172.393,00		11.130.518.580,00		11.432.645.360,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	65	75	10.893.331.535,00	77	10.897.278.445,00	77	10.937.172.393,00	77	11.130.518.580,00	77	11.432.645.360,00		
5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.893.331.535,00		10.897.278.445,00		10.937.172.393,00		11.130.518.580,00		11.432.645.360,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	65	75	10.893.331.535,00	77	10.897.278.445,00	77	10.937.172.393,00	77	11.130.518.580,00	77	11.432.645.360,00		
5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				31.992.272,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	31.992.272,00	2	35.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	55.000.000,00		
5.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				31.992.272,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	31.992.272,00	2	35.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	55.000.000,00		
5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.295.000.000,00		1.435.000.000,00		1.683.000.000,00		1.803.000.000,00		1.803.000.000,00		
Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	1.295.000.000,00	2	1.435.000.000,00	2	1.683.000.000,00	2	1.803.000.000,00	2	1.803.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
5.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00		
5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6	60.000.000,00	6	75.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	9	300.000.000,00	9	300.000.000,00	9	320.000.000,00	9	350.000.000,00	9	350.000.000,00		
5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	75.000.000,00	3	85.000.000,00	3	85.000.000,00		
5.07.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00		
5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00		
5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.932.150.000,00		2.453.600.000,00		2.748.600.000,00		3.058.600.000,00		3.283.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	27	1.932.150.000,00	27	2.453.600.000,00	27	2.748.600.000,00	27	3.058.600.000,00	27	3.283.600.000,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	24		24		24		24		24			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	80		90		90		90		90			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	3		5		6		7		8			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		7		8		8			
5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				450.000.000,00		490.000.000,00		540.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	450.000.000,00	6	490.000.000,00	7	540.000.000,00	8	600.000.000,00	8	650.000.000,00		
5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				688.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		950.000.000,00		1.075.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	27	688.000.000,00	27	750.000.000,00	27	850.000.000,00	27	950.000.000,00	27	1.075.000.000,00		
5.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				45.000.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	24	45.000.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00		
5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.150.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	80	99.150.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00		
5.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000,00		955.000.000,00		1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	3	600.000.000,00	5	955.000.000,00	6	1.100.000.000,00	7	1.250.000.000,00	8	1.300.000.000,00		
5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				927.158.182,00		918.976.847,00		960.690.108,00		1.003.658.549,00		1.034.880.096,00		
Meningkatnya Layanan Terhadap Stakeholder	Persentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persentase)	100	100	927.158.182,00	100	918.976.847,00	100	960.690.108,00	100	1.003.658.549,00	100	1.034.880.096,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN PENGHUBUNG	
5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				927.158.182,00		918.976.847,00		960.690.108,00		1.003.658.549,00		1.034.880.096,00		
Jumlah Layanan terhadap stakeholder	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	1	4	652.158.182,00	4	643.976.847,00	4	685.690.108,00	4	703.658.549,00	4	730.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	1	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	1	8		8		8		8					
5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				300.000.000,00		296.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	1	8	300.000.000,00	8	296.000.000,00	8	310.000.000,00	8	320.000.000,00	8	330.000.000,00		
5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				302.158.182,00		297.976.847,00		325.690.108,00		333.658.549,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	1	4	302.158.182,00	4	297.976.847,00	4	325.690.108,00	4	333.658.549,00	4	350.000.000,00		
5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	1	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	300.000.000,00	4	304.880.096,00		
	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	1	4		4		4		4					



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					19.615.631.989,00		20.335.855.292,00		20.985.462.501,00		21.651.777.129,00		22.220.125.456,00			
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.688.473.807,00		19.416.878.445,00		20.024.772.393,00		20.648.118.580,00		21.185.245.360,00			
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	18.688.473.807,00	100	19.416.878.445,00	100	20.024.772.393,00	100	20.648.118.580,00	100	21.185.245.360,00	5.07.0.00.0.00.01.00 - BADAN PENGHUBUNG		
5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00			
5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	7	7	60.000.000,00	7	60.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00			
5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.893.331.535,00		10.897.278.445,00		10.937.172.393,00		11.130.518.580,00		11.432.645.360,00			
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	65	75	75	10.893.331.535,00	77	10.897.278.445,00	77	10.937.172.393,00	77	11.130.518.580,00	77	11.432.645.360,00			
5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.893.331.535,00		10.897.278.445,00		10.937.172.393,00		11.130.518.580,00		11.432.645.360,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	65	75	75	10.893.331.535,00	77	10.897.278.445,00	77	10.937.172.393,00	77	11.130.518.580,00	77	11.432.645.360,00			
5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					31.992.272,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00			
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	2	31.992.272,00	2	35.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	55.000.000,00			
5.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					31.992.272,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00			
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	2	31.992.272,00	2	35.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	55.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00			
5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00			
5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.295.000.000,00		1.435.000.000,00		1.683.000.000,00		1.803.000.000,00		1.803.000.000,00			
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	2	1.295.000.000,00	2	1.435.000.000,00	2	1.683.000.000,00	2	1.803.000.000,00	2	1.803.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	3		3		3		3		3				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6	6		6		6		6		6				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
5.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					50.000.000,00		60.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00			
5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00			
5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					60.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6	6	60.000.000,00	6	75.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00			
5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	9	9	300.000.000,00	9	300.000.000,00	9	320.000.000,00	9	350.000.000,00	9	350.000.000,00			
5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	75.000.000,00	3	85.000.000,00	3	85.000.000,00			
5.07.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00			
5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					450.000.000,00		550.000.000,00		675.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	450.000.000,00	1	550.000.000,00	1	675.000.000,00	1	740.000.000,00	1	740.000.000,00			
5.07.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00			
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	2	35.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00			
5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	5	2		2		2		2						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	52	6		6		6		6						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN					
			2025	2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
5.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00							
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	5	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00							
5.07.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00							
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	52	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00							
5.07.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00							
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00							
5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.226.000.000,00		4.226.000.000,00		4.226.000.000,00		4.226.000.000,00		4.226.000.000,00							
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	4.226.000.000,00	1	4.226.000.000,00	1	4.226.000.000,00	1	4.226.000.000,00	1	4.226.000.000,00							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1			
5.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00							
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00							
5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00		635.000.000,00							
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00	1	635.000.000,00							
5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00		3.575.000.000,00							
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00	1	3.575.000.000,00							
5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.932.150.000,00		2.453.600.000,00		2.748.600.000,00		3.058.600.000,00		3.283.600.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1.932.150.000,00	1	2.453.600.000,00	1	2.748.600.000,00	1	3.058.600.000,00	1	3.283.600.000,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	6		6		7		8		8				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	160	80		90		90		90		90				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23	27		27		27		27		27				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	24	24		24		24		24		24				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	9	3		5		6		7		8				
5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					450.000.000,00		490.000.000,00		540.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	6	450.000.000,00	6	490.000.000,00	7	540.000.000,00	8	600.000.000,00	8	650.000.000,00			
5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					688.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		950.000.000,00		1.075.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23	27	688.000.000,00	27	750.000.000,00	27	850.000.000,00	27	950.000.000,00	27	1.075.000.000,00			
5.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					45.000.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	24	24	45.000.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00	24	48.600.000,00			
5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					99.150.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	160	80	99.150.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00	90	110.000.000,00			
5.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					600.000.000,00		955.000.000,00		1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	9	3	600.000.000,00	5	955.000.000,00	6	1.100.000.000,00	7	1.250.000.000,00	8	1.300.000.000,00			
5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					927.158.182,00		918.976.847,00		960.690.108,00		1.003.658.549,00		1.034.880.096,00			
Meningkatnya Layanan Terhadap Stakeholder	Persentase Layanan Terhadap Stakeholder (Persentase)	100	100	100	927.158.182,00	100	918.976.847,00	100	960.690.108,00	100	1.003.658.549,00	100	1.034.880.096,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN PENGHUBUNG		
5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					927.158.182,00		918.976.847,00		960.690.108,00		1.003.658.549,00		1.034.880.096,00			
Jumlah Layanan terhadap stakeholder	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	1	8	8	652.158.182,00	8	643.976.847,00	8	685.690.108,00	8	703.658.549,00	8	730.000.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	1	4	4		4		4		4						
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	1	4	4		4		4		4						
5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat					300.000.000,00		296.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00			
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	1	8	8	300.000.000,00	8	296.000.000,00	8	310.000.000,00	8	320.000.000,00	8	330.000.000,00			
5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat					302.158.182,00		297.976.847,00		325.690.108,00		333.658.549,00		350.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	1	4	4	302.158.182,00	4	297.976.847,00	4	325.690.108,00	4	333.658.549,00	4	350.000.000,00			
5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	1	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			
Jumlah Fasilitasi Promosi/Event yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	4	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	300.000.000,00	4	304.880.096,00			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	1	4	4		4		4		4						
5.07.02.1.01.0003 - Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya					225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		254.880.096,00			
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	1	4	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00	4	250.000.000,00	4	254.880.096,00			
5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			

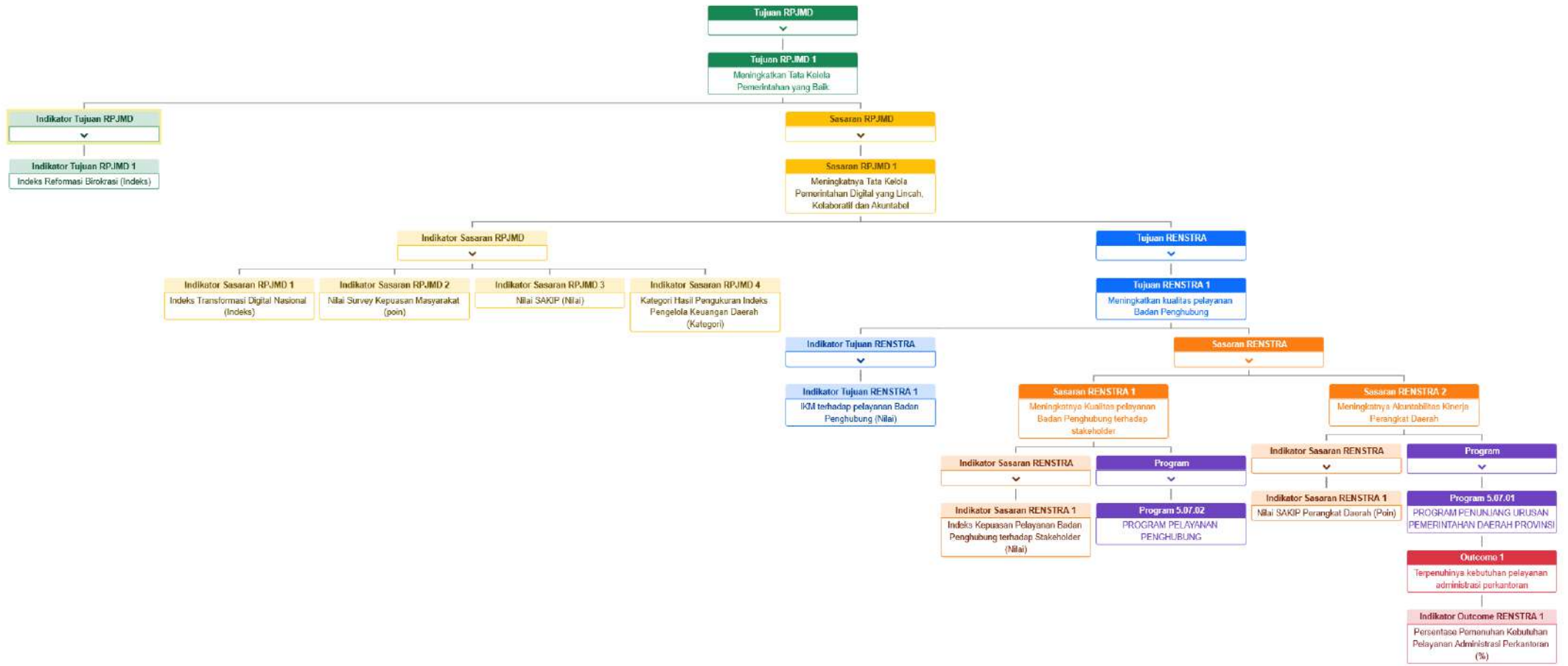
**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG									
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder	Nilai	85	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	67,1	67,5	68	69	70	71	72	





**MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>				
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.		V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambahkan kalimat, program, kegiatan dan sub kegiatan'</li> <li>2. Mengganti dasar hukum permendagri no. 86/2017 menjadi instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029</li> </ol>
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum		V	<p>Untuk menambahkan dasar hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur Nomor 5 tentang RAD Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak</li> </ol>

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029 2. dilengkapi dengan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang PUG, Perda No 3 Tahun 2023 tentang PUG dalam pembangunan Provinsi Riau 3. menambahkan beberapa kelengkapan dari redaksi peraturan dan perundang undangan
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029		V	Menambahkan :  1. Maksud Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. 2. Merubah tahun 2025-2026 menjadi 2025-2029 3. Tujuan Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>				
	<b>Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<p>Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.</p> <p>Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).</p>		V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan data SDM terkait ASN Disabilitas</li> <li>2. Menyajikan data sarana prasarana pendukung inklusi dan gender</li> <li>3. Halaman 14 perlu perbaikan kata 'terbatas' menjadi terdapat</li> <li>4. Perbaiki data persentase ASN pada halaman 12</li> </ol>
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah				
	Sumber daya Perangkat Daerah			V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohon dilengkapi dengan data sarana dan prasana UPT Taman Mini, Asrama yang responsif gender dan mendukung kemudahan disabilitas</li> <li>2. Agar melengkapi kalimat yang terputus pada hal 19 (asrama mahasiswa mempunyai ....)</li> </ol>

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					<p>3. Agar menyampaikan narasi terkait sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung responsif gender selain kondisi toilet yang terpisah dan bangunan asrama yang terpisah</p> <p>Tambahkan sumber data di seluruh tabel</p>
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya			V	<p>1. Tabel 2.10 capaian kinerja berdasarkan target renstra s.d tahun 2024</p> <p>2. Cek kembali tabel pada bab II rata2 data tahun 2024 masih kosong (datanya 2020-2024)</p>
	Kelompok sasaran layanan				
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)				
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)				
	<b>Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah</b>				
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<p>Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan menampilkan data-data yang lebih spesifik dan mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan <u>data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.</u></p> <p>Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (<i>bukan menarasikan tabel</i>). Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis “mengapa” suatu kondisi terjadi dan “apa” implikasinya</p>	V		Mohon didiskusikan terkait permasalahan dan isu gender yang terkait di badan penghubung misalnya akses masyarakat / pengunjung TMII, pengguna asrama dll

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.			
<b>3</b>	<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>				
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	<p>Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. Kalimat kondisi;</p> <p>b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p>		V	Perbaiki kalimat tujuan, agar disesuaikan dengan inputan OPD di sistem SIPD RENSTRA 'Meningkatkan kualitas pelayanan badan penghubung'
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i> . ( <i>Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan utama</i> )		V	1. Perbaiki kalimat sasaran pada point 2, agar disesuaikan dengan inputan OPD di sistem SIPD RENSTRA "meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah"

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					2. Tabel 3.1 tujuan dan sasaran perangkat daerah agar mengunduh dari SIPD renstra
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.		V	1. Dilengkapi dengan strategi yang sesuai dengan rekomendasi dalam subbab isu strategis dan permasalahan tsb  2. Narasi pada alenia pertama kalimatnya terputus tahun.....
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD		V	1. Tabel 3.5 perbaiki kalimat tujuan dan sasaran sesuaikan dengan inputan di sistem SIPD renstra  2. Tambahkan cascading OPD yang diunduh pada SIPD RENSTRA
<b>4</b>	<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>				
	Uraian Program	Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.			
	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, target dan pagu indikatif		V	1. Disusun analisis gender pada sub kegiatan yang ditandai
		Perangkat Daerah memperhatikan:			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
		<p>1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. <i>(dengan menggunakan nomenklatur <b>Terlaksananya, Terpenuhinya, Tersedianya, dst..)</b></i></p>			<p>sebagai kegiatan yang responsif gender dengan menggunakan GAP/GBS/GAB</p> <p>2. Tambahkan pada kolom keterangan berupa tulisan ARG pada tabel 4.3 terkait kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung responsif gender</p> <p>3. Tabel 4.1 , 4.2 dan 4.3 ganti dengan tabel baru yang di unduh dari SIPD RENSTRA</p>
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif			
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	<p>Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir <b>poin 6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)</b></p> <p>- <i>(Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA, DLL..)</i></p> <p>- <i>Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan Prioritas di SIPD Renstra</i></p>		V	Tabel 4.1 , 4.2 dan 4.3 ganti dengan tabel baru yang di unduh dari SIPD RENSTRA

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin <b>7. Indikator Kinerja Utama (Tabel 4.5)</b> <b><i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU</i></b>			
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin <b>8. Indikator Kinerja Kunci (Tabel 4.6)</b> <b><i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Program OPD ke IKK</i></b>			
	Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.	<b>(dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - Bagan)</b>			
<b>5</b>	<b>BAB V PENUTUP</b>				
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah		V	Tambahkan ringkasan komitmen dengan kalimat <b><i>“PD akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Renstra secara responsif gender.”</i></b>  <b>Tanggal penetapan Renstra 28 Oktober 2025</b>

**Pekanbaru, 20 Oktober 2025**

**VERIFIKATOR BAPPEDA PROVINSI RIAU :**

**1. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
RAJA JUARISMAN, ST, M.Si  
NIP. 19770611 200012 1 002**

.....

**2. FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA  
RUDI HENDRA GUNAWAN, S.Kom, M.Si  
NIP. 19701224 199803 1 004**

.....

**3. KETUA TIM/FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA  
ARI DIANUARI, ST  
NIP. 19810103 200901 1 002**

.....

**4. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN  
SRI LESTARI, S.Sos  
NIP. 19791005 200701 2 004**

.....

**TIM BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU**

5. **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**  
**DECY, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19811205 200012 2 002**

.....

6. **FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**  
**BAMBANG ADHI NUGROHO, SE**  
**NIP. 19831214 200501 1 003**

.....

7. **FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA**  
**REDY ARIESNA. SE**  
**NIP. 19790420 200603 1 001**

.....



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

**PEKANBARU**

## CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

<b>INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU</b>	Disusun oleh/ Tanggal	Alfira/	September 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto /	September 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/	September 2025
<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>			
<p>Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Badan Penghubung Praja Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:</p>			
<b>DATA UMUM</b>			
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung .			
Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah . 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder			
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.  Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.			
B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)  Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.			
C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.  1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:  Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> Kertas Kerja Reviu (KKR) - 3 pada SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.  <b>Rekomendasi:</b>  Disarankan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau agar menginput Program Perangkat Daerah pada SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.			

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

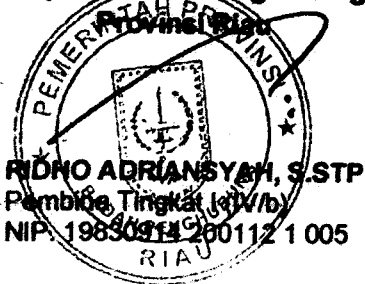
**Rekomendasi:**

Disarankan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, September 2025

**Kepala Badan Penghubung**

**RIDHO ADRIANSYAH, S.STP**  
Pembina Tingkat I (Pw/b)  
NIP. 19830914 200112 1 005



**Supervisor/Pengendali Teknis**

**RONI COKRO SUBAGIO**  
NIP 196712051998031003





## **GUBERNUR RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 276/III/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Koordinator;
  - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 MARET 2025



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
 TAHUN 2025 – 2029

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
<b>DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

<b>NO</b> (1)	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b> (2)	<b>INSTANSI</b> (3)	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> (4)
<b>BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
<b>INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan		Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

<b>NO</b> (1)	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b> (2)	<b>INSTANSI</b> (3)	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> (4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
<b>UPT Riau Science Techno Park</b>			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 276/III/2025  
TANGGAL : 19 Maret 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah</li><li>2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra</li></ol>
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra</li><li>2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah</li><li>3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau</li><li>4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis</li></ol>
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

<b>1</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif</li> <li>2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika;</li> <li>3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah</li> </ol>

